

Profil

Penduduk Lanjut Usia PROVINSI JAWA TIMUR

2023

Volume 14, 2024



Profil

Penduduk Lanjut Usia PROVINSI JAWA TIMUR

2023

Volume 14, 2024

<https://jatim.bps.go.id>



Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2023

Katalog : 4104001.35
ISSN : 2407-3202
Nomor Publikasi : 35000.24020
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xvi+109 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Tim Penyusun

Profil Penduduk Lanjut Usia

ISSN 2407-3202

Provinsi Jawa Timur

2023

Volume 14, 2024

Pengarah:

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

Penanggung Jawab:

Muhamad Suharsa, S.ST., M.Si.

Penyunting:

Muhamad Suharsa, S.ST., M.Si.

Endro Cahyono, S.ST., M.M.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Abdus Salam, S.ST., M.E.

Penata Letak:

Arga Parama Yufinanda, S.ST.

Kata Pengantar

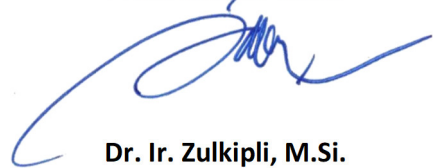
Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau dikenal dengan lansia merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Peningkatan penduduk lansia berjalan beriringan dengan semakin tingginya angka harapan hidup penduduknya. Dari hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2023, diketahui penduduk lansia di Jawa Timur pada Tahun 2023 telah mencapai 14,44 persen yang menandakan bahwa struktur penduduk Jawa Timur tergolong penduduk tua. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi baik berupa potensi dan tantangan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Penduduk lansia mempunyai karakter sosial ekonomi yang berbeda dibanding dengan penduduk muda, sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan agar arah pembangunan juga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk lansia.

Publikasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan penduduk lansia di Jawa Timur. Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi dari para penduduk lansia di Jawa Timur pada Tahun 2023. Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang ditujukan untuk pengembangan serta penyempurnaan publikasi ini di kemudian hari. Semoga publikasi ini memberi manfaat bagi para pengguna data dan khususnya para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan yang mengayomi kepentingan penduduk lansia di Jawa Timur.

Surabaya, Mei 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur



Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

Daftar Isi

Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2023
Volume 14, 2024

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Penyajian	6
Bab II Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup.....	8
2.3 Konsep dan Definisi	9
2.4 Keterbatasan Data	17
2.5 Metode Analisis	18
Bab III Demografi	21
3.1 Struktur Penduduk Jawa Timur	23
3.2 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia	25
3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	27

3.4 Status Perkawinan Penduduk Lansia	29
3.5 Peran Penduduk Lansia dalam Rumah Tangga	31
Bab IV Pendidikan	35
4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	37
4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis	40
4.3 Fasilitas Teknologi Informasi	45
Bab V Kesehatan	49
5.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan.....	53
5.2 Cara Berobat	55
Bab VI Ketenagakerjaan.....	63
6.1 Partisipasi Angkatan Kerja	64
6.2 Karakteristik Lansia Bekerja.....	69
6.3 Lapangan Usaha.....	76
6.4 Status Pekerjaan	79
6.5 Jumlah Jam Kerja	83
6.6 Upah/Pendapatan	85
Daftar Pustaka	87
Lampiran	89

Daftar Tabel

No.	Judul	Hal
Tabel 3.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2023	26
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2023	30
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2023	32
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	38
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023	41
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Akses Teknologi Informasi, 2023	46
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Lansia Dengan Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Cara Berobat, 2023	57

No.	Judul	Hal
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah, dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2023	58
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status dalam Rumah Tangga, 2023	73
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	75
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah, Lapangan Usaha, 2023	77
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Usia, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Lapangan Usaha, 2023	78
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2023	80

No.	Judul	Hal
Tabel 6.6	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2023	84
Tabel 6.7	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Per Bulan, 2023.....	85

<https://jatim.bps.go.id>

Daftar Gambar

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Empat Karakteristik Penduduk Lanjut usia di Jawa Timur, 2023	28
Gambar 3.1	Struktur Usia Penduduk Jawa Timur, 2023	24
Gambar 3.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2020–2023	28
Gambar 4.1	Angka Buta Aksara/Huruf Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2018–2023.....	44
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia, 2023	54
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Lansia dengan Keluhan Kesehatan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Tipe Daerah, 2023	60
Gambar 6.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Kelompok Usia, 2023	65
Gambar 6.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2023	67

Gambar 6.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2023	69
Gambar 6.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Tipe Daerah, 2023	70
Gambar 6.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2023...	71
Gambar 6.6	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2023.....	72
Gambar 6.7	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Status Pekerjaan, 2023.....	82

1 BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator pencapaian Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019-2024 di bidang kesehatan adalah indikator naiknya Angka Harapan Hidup (AHH). Dari indikator AHH ini, dapat menunjukkan peningkatan/penurunan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan peningkatan/penurunan derajat kesehatan pada khususnya. Selain itu, indikator ini juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan visi tersebut, peningkatan AHH akan tercapai jika terjadi peningkatan derajat kesehatan pada semua usia, khususnya pada golongan penduduk lanjut usia (lansia). Kebijakan kelanjutusiaan juga tertuang dalam RPJMN Indonesia 2020-2024 yaitu peningkatan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi

masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini pun sejalan dengan target dan sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu memenuhi hak setiap orang tanpa memandang kelompok usia dan fokus khusus pada kelompok rentan termasuk lansia.

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup pada kelompok lansia tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk yang tak lepas dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibarengi oleh peningkatan pelayanan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan jaminan kesehatan secara signifikan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk senantiasa dalam kondisi sehat sehingga peluang untuk hidup lebih lama pun semakin meningkat. Di sisi lain, pendidikan juga sangat memengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat dan menambah pengetahuan masyarakat akan pilihan-pilihan baik untuk hidup sehat ataupun pilihan-pilihan pengobatan atas penyakit yang diderita sehingga akan memperpanjang peluang mereka untuk hidup.

Namun demikian, implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam rasio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan

berdampak dua sisi, positif dan negatif, terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Dampak ini bergantung seberapa baik kehidupan lansia dipersiapkan. Dampak positif terjadi ketika penduduk lansia berada dalam kondisi mandiri, sehat, aktif dan produktif sehingga golongan lansia ini sedikit banyak membantu kesejahteraan keluarga. Para lansia tersebut akan meringankan beban penduduk usia produktif yang seharusnya menanggung hidup para lansia. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk lansia akan menjadi tantangan saat persiapan menuju masa tua tidak dilakukan dengan baik sehingga mengakibatkan lansia jauh dari kondisi sehat, aktif, dan produktif. Hal ini tentunya akan menambah beban penduduk usia produktif terhadap penduduk lansia.

Menjadi tua merupakan fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Secara fisik, orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses *degenerative* sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian terhadap lansia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Peringatan Hari Lansia ini diharapkan agar pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik, dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, melainkan juga dilakukan terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro kondisi dan potensi penduduk lansia di berbagai aspek penting, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada level nasional maupun provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan penduduk lansia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur dilihat dari berbagai aspek, antara lain demografi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia Jawa Timur dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Penyajian publikasi ini diharapkan berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2022 ini disajikan dalam enam bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Empat bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia; bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan akses fasilitas teknologi informasi; bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan penduduk lanjut usia yang bekerja.

2 BAB

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2023 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Susenas Maret Tahun 2023, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia dari sisi demografi, kesehatan, dan pendidikan. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap

tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara Triwulan (Triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Selanjutnya, mulai tahun 2015 pelaksanaan Susenas menjadi 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September.

- b. Data Sakernas Agustus Tahun 2023, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan penduduk lansia.

Sakernas merupakan survei khusus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. BPS telah melaksanakan Sakernas sejak tahun 1976. Hingga saat ini Sakernas telah mengalami berbagai perubahan, baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan maupun metodologi, mulai tahun 2015 Sakernas dilaksanakan tiap semester, yakni pada bulan Februari dan Agustus.

- c. Data Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, digunakan untuk memperoleh struktur penduduk Jawa Timur, distribusi dan komposisi serta rasio ketergantungan penduduk lansia.

2.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Maret 2023 mencakup 32.630 rumah tangga sampel yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Data hasil pencacahan tersebut dapat disajikan baik untuk tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Susenas tidak

mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya. Susenas juga tidak mencakup rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

Sakernas merupakan salah satu survei yang dilaksanakan BPS untuk menghasilkan data sampai level kabupaten/kota. Pada tahun 2023, Sakernas mencakup 26.760 rumah tangga sampel. Sama halnya dengan Susenas, Sakernas juga tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus atau juga rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

2.3. Konsep dan Definisi

- a. **Penduduk Lanjut Usia (Lansia)** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas.
- b. **Penduduk Pra Lansia** adalah penduduk berusia 45-59 tahun.
- c. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan.
- d. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun

mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berusia 60 tahun ke atas.

- e. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.
- f. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari

1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- g. **Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia** adalah perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun).
- h. **Belum Kawin** adalah belum pernah terikat dalam perkawinan.
- i. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat disekelilingnya dianggap sebagai suami-isteri.
- j. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, atau untuk keperluan lain. Perempuan yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.
- k. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

l. Pendidikan:

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

m. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

n. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu

PT/ sederajat) maupun pendidikan non-formal berupa pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.

- o. **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD Sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP Sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA Sederajat meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademik/perguruan tinggi yang

menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma 4 atau strata 1, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- p. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- q. **Lansia Muda** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 60-69 tahun.
- r. **Lansia Menengah/Madya** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 70-79 tahun.
- s. **Lansia Tua** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 80 tahun ke atas.
- t. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, perbuatan kriminal, dan lain-lain.

- u. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- v. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan (baik bekerja maupun sementara tidak bekerja) atau tidak mempunyai pekerjaan tapi sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut bisa dilakukan secara berturut-turut atau juga bisa dilakukan secara terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah kegiatan dari mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan pengembangan suatu usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya.

- w. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan

lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan apa-apa.

- x. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK_{Lansia} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

- y. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- z. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- aa. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

2.4. Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas dan Sakernas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar atau grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah kabupaten/kota. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur.



Sumber: Susenas Maret 2023 dan SAKERNAS Agustus 2023

Gambar 2.1 Empat Karakteristik Penduduk Lanjut Usia di Jawa Timur, 2023

3 BAB

DEMOGRAFI

Demografi adalah studi tentang perubahan jumlah, distribusi, komposisi, dan keragaman penduduk dari waktu ke waktu. Sebagaimana diketahui, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar ini jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dasar dan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat penting karena selain sebagai sasaran dari pembangunan, penduduk juga sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat bergantung kepada penduduknya. Jika penduduk wilayah tersebut berkualitas, maka akan menjadi sumber daya dan potensi yang sangat kuat dalam pembangunan. Begitu pun sebaliknya. Salah satu indikator kualitas penduduk sekaligus indikator keberhasilan dari pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk di wilayah tersebut.

Perencanaan yang tepat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai, terutama ketika memposisikan penduduk sebagai sasaran maupun pelaku pembangunan. Oleh karena itu, data demografi sangat diperlukan ketika melakukan kegiatan perencanaan pembangunan serta menetapkan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan. Salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai komposisi penduduk menurut usia atau kelompok usia antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan usia tertentu. Misalnya, penduduk usia 0-4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

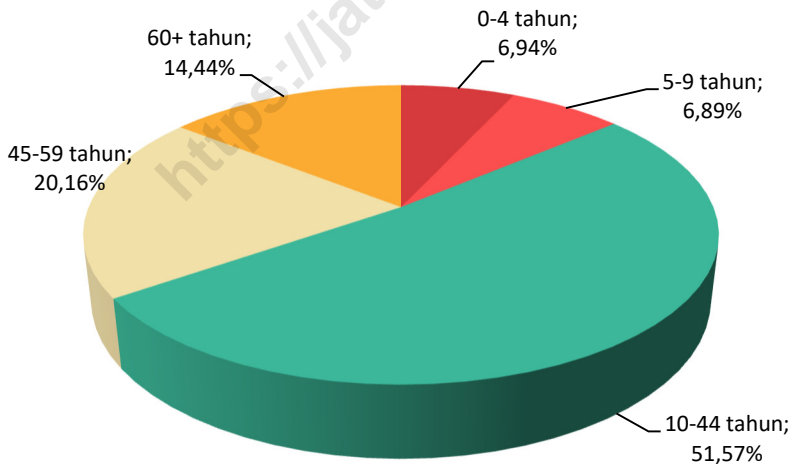
Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun keatas atau lansia. Komposisi usia penduduk dunia telah berubah sejak abad ke-20 dan berlanjut hingga abad ke-21, yaitu jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga terjadi baik di Indonesia maupun di Jawa Timur. Peningkatan penduduk lansia merupakan bagian dari proses transisi demografi bahwa kemajuan pembangunan diyakini sebagai faktor signifikan terjadinya perubahan struktur penduduk. Dua faktor kependudukan yang saling

melengkapi adalah penurunan tingkat mortalitas yang diiringi dengan semakin rendahnya angka fertilitas. Hal ini merupakan dampak dari perubahan nilai pada masyarakat yang semakin anti-mortalitas, kesadaran pentingnya hidup sehat dan perencanaan kelahiran yang baik, serta kemajuan teknologi kedokteran. Sejalan dengan itu, maka perumusan dan arah kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Oleh karenanya, dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografi penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran serta target pembangunan. Uraian pada bab ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur penduduk dalam rumah tangga.

3.1. Struktur Penduduk Jawa Timur

Suatu daerah dikatakan memiliki struktur penduduk tua jika mempunyai populasi lansia diatas tujuh persen. Gambar 3.1 memperlihatkan persentase lansia di Jawa Timur telah mencapai 14,44 persen dari keseluruhan penduduk, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur termasuk daerah dengan struktur penduduk menuju tua

(ageing population). Struktur penduduk yang menuju tua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia, yaitu adanya peningkatan usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keberhasilan tersebut akan semakin berarti jika penduduk lansia bisa mandiri, berkualitas, serta dapat berperan dalam pembangunan. Selain menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, peningkatan jumlah lansia ini juga merupakan tantangan dalam pembangunan.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 3.1 Struktur Usia Penduduk Jawa Timur, 2023

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kepedulian akan kesejahteraan lansia tertuang dalam Undang-Undang No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Amanat dari undang-undang tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar atau bahkan lebih baik lagi.

3.2. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata angka harapan hidup perempuan di Jawa Timur lima tahun lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, angka harapan hidup perempuan mencapai 77,63 tahun dan laki-laki mencapai 72,24 tahun. Akibatnya, keberadaan penduduk lansia perempuan akan cenderung lebih banyak daripada lansia laki-laki. Dari tabel 3.1 terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah lansia perempuan di Jawa Timur mencapai 3,19 juta orang, lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki yang mencapai 2,80 juta orang. Demikian juga proporsi lansia perempuan terhadap total penduduk perempuan (15,34 persen) di Jawa Timur menunjukkan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan proporsi lansia laki-laki terhadap total penduduk laki-laki (13,53 persen). Sejalan dengan usia harapan hidup penduduk perempuan dan laki-laki, selisih proporsi lansia

perempuan terhadap proporsi lansia laki-laki melebar seiring pertambahan kelompok usia.

Tabel 3.1
Jumlah dan Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut
Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2023

Kelompok Usia	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pra Lansia	4.105.453	19,82	4.266.698	20,50	8.372.151	20,16
45-54 tahun	2.872.958	13,87	2.969.684	14,27	5.842.642	14,07
55-59 tahun	1.232.495	5,95	1.297.014	6,23	2.529.509	6,09
Lansia	2.801.351	13,53	3.193.580	15,34	5.994.931	14,44
60-69 tahun	1.807.778	8,73	1.930.505	9,27	3.738.283	9,00
70-74 tahun	524.794	2,53	591.225	2,84	1.116.019	2,69
75 tahun +	468.779	2,26	671.850	3,23	1.140.629	2,75

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035
 Hasil Sensus Penduduk 2020

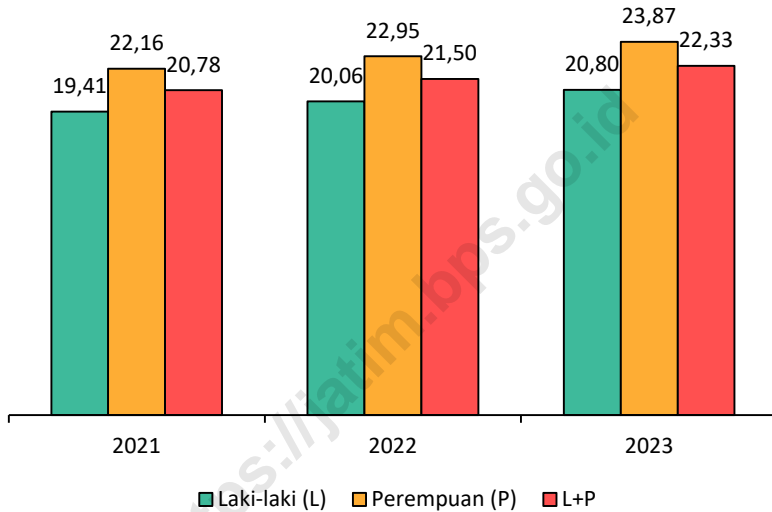
Ageing merupakan proses menua, sehingga mewujudkan *active ageing* (menua dengan aktif) tidak cukup pada kelompok penduduk berusia 60 tahun ke atas, melainkan pada seluruh tahapan siklus manusia. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan

keberadaan penduduk lansia saat ini, tetapi juga perlu memetakan para penduduk lansia di masa depan, yaitu penduduk 45-59 tahun yang selanjutnya disebut penduduk pra lansia. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa penduduk pra lansia tahun 2023 mencapai 20,16 persen. Persentase penduduk pra lansia perempuan (20,50 persen) lebih tinggi daripada penduduk pra lansia laki-laki (19,82 persen). Mempersiapkan penduduk pra lansia dengan baik menyongsong masa lansianya menjadi hal yang perlu dilakukan agar nantinya bisa menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan produktif.

3.3. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Terus bertambahnya jumlah penduduk lansia di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengubah struktur penduduk. Salah satu implikasinya adalah bertambahnya rasio ketergantungan penduduk lansia (*old dependency ratio*). Rasio ketergantungan lansia merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Angka tersebut mencerminkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia, dengan asumsi bahwa penduduk lansia tersebut bukanlah penduduk lansia yang produktif. Angka tersebut juga mencerminkan ketersediaan tenaga kerja produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan penduduk lansia maka semakin banyak tersedia tenaga kerja yang

produktif. Rasio ketergantungan penduduk lansia disajikan pada Gambar 3.2 berikut ini.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2021–2023

Angka rasio ketergantungan penduduk lansia Jawa Timur pada tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 sebesar 22,33. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 22 orang penduduk lansia. Dikaitkan dengan keberadaan lansia perempuan yang cenderung lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki, maka akan lebih banyak

lansia perempuan yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini terlihat dari gambar 3.2, rasio ketergantungan penduduk lansia perempuan (23,87%) yang lebih tinggi daripada penduduk lansia laki-laki (20,80%).

3.4. Status Perkawinan Penduduk Lansia

Salah satu komposisi penduduk yang menarik untuk diamati adalah komposisi penduduk lansia menurut status perkawinan. Berdasarkan Susenas Maret 2023, sebagian besar penduduk lansia di Jawa Timur berstatus kawin yaitu 62,08 persen, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 35,38 persen. Penduduk lansia yang berstatus cerai hidup sebesar 1,88 persen dan yang belum kawin sebesar 0,66 persen (Tabel 3.2). Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola status perkawinan antara penduduk lansia laki-laki dengan penduduk lansia perempuan. Sebagian besar lansia laki-laki memiliki status kawin, yaitu 83,50 persen dan lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sebanyak 14,75 persen. Sementara itu, pada penduduk lansia perempuan tercatat hanya sekitar 43,50 persen lansia perempuan yang berstatus kawin. Proporsi status perkawinan terbesar pada lansia perempuan justru adalah para lansia perempuan yang berstatus cerai mati, yaitu 53,27 persen.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin,
dan Status Perkawinan, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,61	80,53	1,58	17,29	100,00
Perempuan (P)	0,96	43,19	2,44	53,42	100,00
L + P	0,79	60,70	2,03	36,47	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,33	86,89	0,94	11,85	100,00
Perempuan (P)	0,69	43,83	2,37	53,11	100,00
L + P	0,52	63,61	1,71	34,16	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	0,48	83,50	1,28	14,75	100,00
Perempuan (P)	0,83	43,50	2,40	53,27	100,00
L + P	0,66	62,08	1,88	35,38	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan relatif memiliki usia panjang dibandingkan laki-laki. Ketika suatu pasangan memasuki usia tua, istri/perempuan cenderung akan lebih dahulu ditinggal mati oleh pasangannya. Di satu sisi, hal ini juga memberikan indikasi yang menarik dari sisi pola perkawinan. Perempuan, terutama pada usia tua, cenderung untuk tidak bersegera menikah lagi ketika ditinggal mati oleh pasangannya yang terdahulu atau bahkan memilih untuk tetap menjanda hingga akhir hayatnya. Hal ini

sangat berbeda dengan laki-laki yang biasanya akan segera menikah kembali ketika dirinya ditinggal oleh sang istri/pasangannya karena tidak bisa “sendiri” sehingga lansia laki-laki yang berstatus cerai mati atau duda relatif lebih sedikit.

Pola yang sama terjadi pada semua kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana data pada lampiran Tabel 3.4.1 sampai dengan Tabel 3.4.3. Selain itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan juga memberikan pola status perkawinan yang serupa untuk laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa penduduk lansia laki-laki lebih banyak berstatus kawin, sedangkan penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati.

3.5. Peran Penduduk Lansia Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan keberadaan penduduk lansia dalam suatu rumah tangga perlu dikaji peranan penduduk lansia tersebut dalam rumah tangga. Idealnya penduduk lansia dalam rumah tangga adalah sebagai agen transfer pengetahuan kepada generasi selanjutnya dan semestinya peran tersebut tidak membebani para penduduk lansia. Dalam suatu rumah tangga penduduk lansia dapat berperan sebagai kepala rumah tangga (KRT), istri/pasangan, orang tua/mertua KRT atau lainnya. Dari peran tersebut, peran sebagai KRT adalah yang paling berat karena KRT adalah orang yang bertanggung jawab secara ekonomi atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.

Peranan KRT sangat menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi, KRT juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin,
dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kepala Rumah Tangga	Istri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	83,33	0,90	14,74	1,02	100,00
Perempuan (P)	26,37	36,51	33,45	3,67	100,00
L + P	53,08	19,81	24,67	2,43	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	84,00	0,86	13,68	1,45	100,00
Perempuan (P)	24,96	37,07	33,92	4,05	100,00
L + P	52,08	20,43	24,63	2,86	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	83,65	0,88	14,25	1,22	100,00
Perempuan (P)	25,70	36,78	33,67	3,85	100,00
L + P	52,61	20,11	24,65	2,63	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023

Dari Tabel 3.3, terlihat bahwa sebagian besar penduduk lansia berperan sebagai kepala rumah tangga (KRT) yaitu 52,61 persen. Sementara sebagian kecil lainnya berperan sebagai mertua/orang tua (24,65 persen), pasangan KRT (20,11 persen), dan lainnya 2,63

persen. Pola yang sama juga terjadi di perkotaan maupun di perdesaan.

Dari tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa sekitar 8 dari tiap 10 lansia laki-laki berperan sebagai KRT, sedangkan hanya 2 sampai 3 dari tiap 10 lansia perempuan berperan sebagai KRT. Penduduk lansia laki-laki lebih cenderung berperan sebagai KRT, sementara peran penduduk lansia perempuan dalam rumah tangga relatif berimbang antara sebagai KRT, istri/pasangan KRT, dan mertua/orang tua.

Meski demikian, proporsi peran lansia perempuan terbesar adalah sebagai istri/pasangan (36,78 persen). Proporsi peran lansia perempuan terbesar sebagai pasangan KRT terjadi di semua tipe daerah, baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, terlihat bahwa proporsi lansia perempuan yang berperan sebagai orang tua/mertua (33,67 persen) jauh lebih besar dibandingkan proporsi lansia laki-laki sebagai orang tua/mertua (14,25 persen). Jika dikaitkan dengan pola status perkawinan penduduk lansia perempuan yang sebagian besar berstatus cerai mati, mereka yang berstatus cerai mati tersebut cenderung tinggal dengan anak/menantunya daripada memilih untuk menikah lagi.

4 BAB

PENDIDIKAN

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, di Pasal 31 Ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia.

Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Sedangkan penduduk yang berusia tua pun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2) poin d tentang hak dan

kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan keterampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja, dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda

memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses penuaan yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Lansia yang masih bertahan sampai dengan sekarang adalah generasi terdahulu yang menikmati masa muda pada awal masa kemerdekaan. Oleh karenanya, tingkat pendidikan yang dicapai penduduk lanjut usia lebih merupakan cermin pendidikan tempo dulu. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan pada masa tersebut masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi pendidikan para lansia tersebut.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa sebagian besar penduduk lansia masih berpendidikan rendah. Sekitar 7 sampai 8 dari tiap 10 penduduk lansia di Jawa Timur berpendidikan SD ke bawah. Terdapat sekitar 18 orang di antara 100 orang lansia yang tidak pernah sekolah. Sementara itu, penduduk lansia yang tidak tamat SD sebesar 31,14 persen dan yang menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar/ sederajat sebesar 28,16 persen.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat atau Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	6,69	23,84	31,16	12,22	26,09	100,00
Perempuan (P)	16,33	31,25	26,81	8,50	17,11	100,00
L+P	11,81	27,78	28,85	10,24	21,32	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	17,19	33,52	32,23	8,40	8,67	100,00
Perempuan (P)	32,14	36,06	23,30	4,17	4,33	100,00
L+P	25,27	34,89	27,40	6,11	6,32	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	11,59	28,36	31,66	10,43	17,95	100,00
Perempuan (P)	23,87	33,55	25,14	6,44	11,01	100,00
L+P	18,17	31,14	28,16	8,29	14,24	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023

Penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan cenderung mempunyai akses pendidikan yang lebih baik dalam dunia pendidikan daripada penduduk lansia di daerah perdesaan. Proporsi lansia perdesaan (25,27 persen) yang tidak pernah bersekolah dua kali lipat proporsi lansia di perkotaan (11,81 persen). Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, proporsi penduduk lansia di perkotaan

yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 10,24 persen, jauh lebih tinggi daripada di perdesaan yang hanya 6,11 persen. Untuk jenjang SMA/ sederajat atau lebih, persentase penduduk lansia di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut sebesar 21,32 persen atau tiga kali lipat lebih dari persentase penduduk lansia di perdesaan yang menamatkan jenjang yang sama (6,32 persen). Ketimpangan ini bisa terjadi karena fasilitas pendidikan di perkotaan yang lebih unggul dibandingkan di perdesaan sejak dulu atau mungkin juga disebabkan oleh migrasi penduduk dengan pendidikan tinggi dari perdesaan ke perkotaan.

Pola pendidikan yang ditamatkan penduduk lansia laki-laki dan perempuan pun terlihat berbeda. Penduduk lansia laki-laki cenderung mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada penduduk lansia perempuan terutama pada jenjang pendidikan SMP ke atas. Penduduk lansia laki-laki yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat ke atas persentasenya lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia perempuan. Sementara itu, persentase penduduk lansia perempuan yang tidak pernah bersekolah (23,87 persen), lebih tinggi dua kali lipat persentase penduduk lansia laki-laki (11,59 persen). Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam bidang pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan.

Kondisi rendahnya pendidikan lansia merata di semua kabupaten/kota. Merujuk pada lampiran tabel 4.1.3 terlihat bahwa

kabupaten/kota dengan proporsi penduduk lansia dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/ sederajat ke bawah tertinggi adalah kabupaten/kota di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sampang (96,83 persen) dan Kabupaten Sumenep (91,98 persen). Sementara itu, kabupaten/kota di Jawa Timur dengan proporsi lansia berpendidikan SMA/ sederajat ke atas tertinggi, yaitu Kota Surabaya (52,57 persen), Kota Madiun (46,95 persen) dan Kota Malang (43,01 persen).

4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat bermanfaat bagi penduduk lansia. Melalui kemampuan membaca dan menulis, penduduk lansia dapat mengakses ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai alat komunikasi baik lewat kertas maupun media elektronik, dan dapat pula membantu pengentasan buta aksara generasi penerusnya. Seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupannya sehari-hari jika memiliki kemampuan dasar berupa kemampuan membaca dan menulis.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis disebut buta aksara. Buta aksara merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta aksara menunjukkan proporsi penduduk buta aksara terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Salah satu program pemerintah untuk mengurangi angka buta aksara adalah dengan

Program Keaksaraan Fungsional (KF). Prioritas program KF adalah penduduk buta aksara usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataannya, hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar lansia masih cukup besar. Perlu diperhatikan, kemampuan membaca dan menulis bisa hilang seiring berjalannya waktu terlebih pada penduduk lansia baik itu disebabkan ingatan yang menurun (lupa), terlalu lama tidak menggunakan kemampuan tersebut atau faktor lainnya.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis				Total
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	37,41	2,24	51,37	8,98	100,00
Perempuan (P)	34,05	3,15	40,20	22,60	100,00
L+P	35,63	2,72	45,44	16,21	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	30,77	3,53	40,47	25,23	100,00
Perempuan (P)	26,83	3,79	26,03	43,35	100,00
L+P	28,64	3,67	32,66	35,03	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	34,31	2,84	46,28	16,57	100,00
Perempuan (P)	30,61	3,46	33,44	32,49	100,00
L+P	32,33	3,17	39,41	25,10	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023

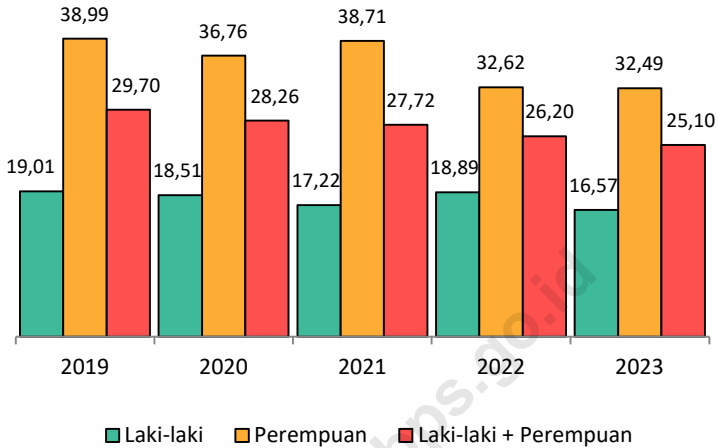
Hampir 75 persen penduduk lansia di Provinsi Jawa Timur mampu membaca dan menulis pada tahun 2023. Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa persentase penduduk lansia yang mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 35,63 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya saja sebesar 3,17 persen, serta mampu membaca dan menulis huruf latin dan lainnya sebesar 39,41 persen. Sementara itu penduduk lansia yang sama sekali tidak mampu membaca dan menulis sebesar 25,10 persen.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa penduduk lansia di perkotaan lebih banyak yang mampu membaca dan menulis daripada di perdesaan. Penduduk lansia di perkotaan yang mampu membaca dan menulis sebesar 83,79 persen, yang terdiri dari mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 35,63 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 2,72 persen serta mampu membaca dan menulis huruf latin juga huruf lainnya sebesar 45,44 persen. Sementara itu, penduduk lansia di perdesaan yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 64,97 persen, yang terdiri dari mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 28,64 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya saja sebesar 3,67 persen, serta mampu membaca dan menulis keduanya sebesar 32,66 persen. Penduduk lansia perdesaan yang buta huruf mencapai 35,03 persen.

Kesenjangan yang cukup tinggi dalam kemampuan membaca dan menulis terjadi pada penduduk lansia laki-laki dan perempuan.

Proporsi penduduk lansia perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis sebesar 32,49 persen atau lebih tinggi dua kali lipat lebih dibandingkan dengan proporsi lansia laki-laki sebesar 16,57 persen. Kondisi serupa terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi dan menghapus buta aksara untuk penduduk lansia maupun pra lansia masih sangat diperlukan, khususnya untuk penduduk perempuan. Upaya tersebut diperlukan, terlebih dari sisi usia, usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sehingga kemampuan membaca dan menulis tersebut diharapkan akan lebih memudahkan kehidupan yang dijalaninya.

Gambar 4.1 menunjukkan angka buta aksara atau juga yang dikenal sebagai buta huruf penduduk lansia menurut jenis kelamin dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam rentang waktu tersebut, angka buta huruf penduduk lansia mengalami perubahan yang cukup berfluktuasi, namun polanya menunjukkan penurunan. Banyak faktor yang memengaruhi perubahan angka buta aksara pada penduduk lansia. Salah satunya, kemampuan fisik dan non fisik seperti daya ingat penduduk lansia yang cenderung menurun membuat mereka yang semula telah lulus program KF atau pernah mengenyam pendidikan di masa mudanya kembali kehilangan kemampuan baca tulisnya.



Sumber: Susenas, 2019–2023

Gambar 4.1 Angka Buta Aksara/Huruf Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2019–2023

Lampiran Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa proporsi lansia yang buta huruf antar kabupaten/kota sangat bervariasi antara 2,86 persen sampai 58,20 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi secara berturut-turut terjadi di Kabupaten Sampang (58,20 persen), Kabupaten Sumenep (49,26 persen) dan Kabupaten Probolinggo (48,74 persen). Sebaliknya, kabupaten/kota dengan persentase lansia buta huruf terendah secara berturut-turut adalah Kota Madiun (2,86 persen), Kota Surabaya (3,98 persen), Kota Blitar (4,31 persen).

4.3. Fasilitas Teknologi Informasi

Geroteknologi merupakan ilmu yang mempelajari kaum lansia dan hubungannya dengan perkembangan teknologi. Pendekatan ini merupakan ilmu terbaru yang menguraikan sejauh mana perkembangan teknologi bagi kaum lansia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang atau kesempatan bagi kaum lansia untuk mengembangkan dirinya. Geroteknologi sebenarnya merupakan ilmu praktis untuk memudahkan para penduduk lansia dalam menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi bagi kaum lansia akan membantu mereka untuk dapat menjalankan masa tuanya secara mandiri. Akses teknologi informasi yang dimiliki oleh penduduk lansia disajikan dalam Tabel 4.3.

Sarana teknologi informasi yang paling banyak diakses oleh penduduk lansia di Jawa Timur adalah telepon seluler (40,97 persen). Sementara itu, penduduk lansia yang mengakses internet baik melalui komputer/laptop/tablet, HP maupun media lainnya sebesar 18,11 persen. Proporsi lansia yang menggunakan komputer/laptop/tablet sebesar 1,11 persen.

Tabel 4.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan
Akses Teknologi Informasi, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Akses Teknologi Informasi					
	Telepon Seluler (HP)		Komputer/ Laptop/Tablet		Internet	
	Akses	Tidak akses	Akses	Tidak akses	Akses	Tidak akses
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	55,02	44,98	2,38	97,62	32,02	67,98
Perempuan (P)	37,78	62,22	1,22	98,78	19,58	80,42
L+P	45,87	54,13	1,76	98,24	25,41	74,59
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	43,52	56,48	0,59	99,41	13,47	86,53
Perempuan (P)	28,67	71,33	0,18	99,82	6,94	93,06
L+P	35,49	64,51	0,37	99,63	9,94	90,06
K+D						
Laki-laki (L)	49,65	50,35	1,54	98,46	23,35	76,65
Perempuan (P)	33,44	66,56	0,73	99,27	13,56	86,44
L+P	40,97	59,03	1,11	98,89	18,11	81,89

Sumber: Susenas Maret 2023

Penggunaan teknologi biasanya dipengaruhi tingkat pendidikan lansia. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk mengakses teknologi. Seperti telah diulas dalam bab sebelumnya bahwa penduduk lansia di perkotaan umumnya memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan

penduduk lansia di perdesaan. Dengan demikian, kecenderungan penduduk lansia perkotaan menggunakan teknologi lebih tinggi daripada di perdesaan.

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa proporsi penduduk lansia di perkotaan yang menggunakan telepon seluler lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia di perdesaan. Begitu pula, penggunaan komputer/laptop/tablet dan internet oleh lansia di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Bahkan, proporsi penduduk lansia perkotaan yang menggunakan internet (25,41 persen) atau 3 kali lipat lebih dibandingkan penduduk lansia di perdesaan (9,94 persen) yang menggunakan internet.

5 BAB

KESEHATAN

Ada sebuah pepatah “*Men sana incorpore sano*” yang berarti di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif sosial dan ekonomis. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas hidup yang baik akan didapat bila seseorang memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan lebih baik dan optimal bila dibandingkan dengan kesehatan orang yang sedang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Tingkat/derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Hal ini dikarenakan manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM yang andal, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua usia, termasuk penduduk lansia. Aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan bertambahnya usia. Penurunan daya tahan tubuh penduduk lansia hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua pihak agar para penduduk lansia memiliki kesehatan yang prima dalam rangka melanjutkan aktivitas kehidupannya. Agar penduduk lansia selalu memiliki kesehatan yang prima salah satunya

adalah dengan meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan penduduk lansia.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 Ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian mengenai pelayanan kesehatan penduduk lansia adalah penelitian pelayanan kesehatan penduduk lansia di rumah sakit. Penelitian menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki kecenderungan memberikan perlindungan kepada lansia dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran untuk penyediaan

fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia masih menyatu dengan anggaran rumah sakit secara keseluruhan, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah maupun DPRD (belum ada kebijakan yang dikeluarkan bagi perlindungan penduduk lansia di rumah sakit), belum adanya landasan yuridis (peraturan pemerintah), dan terbatasnya SDM staf pelayanan kesehatan penduduk lansia. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penduduk lansia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan, dan perlunya anggaran khusus program penduduk lansia. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan khusus untuk penduduk lansia diantaranya adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar penduduk lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama penduduk lansia.

Berdasarkan ilmu kesehatan, semakin aktif seorang lansia maka akan semakin baik daya tahan fisik, pikiran, dan kebahagiaannya. Kondisi kesehatan penduduk lansia tidak hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat

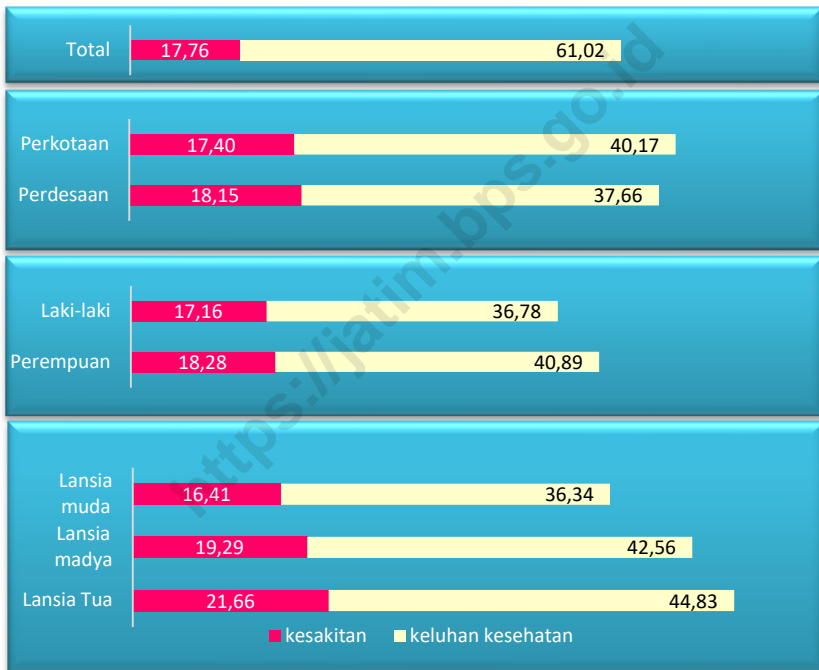
dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan seorang lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat yang biasanya terlihat dari gangguan kesehatan yang dikeluhkannya.

5.1. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara umum. Selain itu, keluhan kesehatan juga mencerminkan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk secara umum.

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Kondisi ini sangat mungkin dialami penduduk lansia yang daya tahan tubuhnya menurun sehingga rentan terhadap penyakit. Angka morbiditas (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami

masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari mereka selama sebulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan. Semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang baik.



Sumber: Susenas Maret 2023

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia, 2023

Penduduk lansia menurut kelompok usia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia menengah atau madya (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas). Secara umum

persentase penduduk lansia yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan angka kesakitan dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Dari gambar 5.1 di atas terlihat bahwa semakin bertambahnya usia, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar. Penduduk lansia muda ada sebanyak 36,34 persen yang mengalami keluhan kesehatan yang merupakan angka terendah jika dibandingkan dengan penduduk lansia madya ataupun lansia tua. Lansia tua yang mengalami keluhan kesehatan dan berakibat terganggunya aktifitas sehari-hari sebesar 21,66 persen dan menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kelompok lansia di bawahnya. Lansia perempuan relatif lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan lansia perempuan. Dilihat dari tipe wilayah, lansia di perkotaan lebih dari 40 persen mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Namun, keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari lebih besar di perdesaan. Sedangkan lansia di perkotaan cenderung lebih rendah proporsi mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan lansia di perdesaan.

5.2. Cara Berobat

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam upaya penyembuhan mencerminkan orang tersebut peduli

akan kesehatannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan, baik oleh seseorang yang menderita sakit itu sendiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan maupun rawat jalan.

Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Berdasarkan data Susenas Maret 2023, sebesar 38,98 persen lansia di Jawa Timur mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

Tabel 5.1
Persentase Penduduk Lansia Dengan Keluhan Kesehatan Sebulan
Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Cara Berobat, 2023

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Persentase Lansia Dengan Keluhan Kesehatan	Cara Berobat				Total
		Tidak Berobat	Berobat Sendiri saja	Berobat Jalan saja	Berobat Sendiri dan Berobat Jalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	37,63	3,63	52,12	18,23	26,01	100,00
Perempuan (P)	42,41	2,66	53,88	19,22	24,24	100,00
L + P	40,17	3,09	53,11	18,79	25,02	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	35,82	3,52	57,29	13,79	25,40	100,00
Perempuan (P)	39,22	2,76	54,84	16,08	26,32	100,00
L + P	37,66	3,09	55,91	15,08	25,92	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	36,78	3,58	54,47	16,21	25,73	100,00
Perempuan (P)	40,89	2,71	54,32	17,78	25,19	100,00
L + P	38,98	3,09	54,39	17,09	25,43	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023

Dari total lansia dengan keluhan kesehatan tersebut, sebesar 54,39 persen diantaranya hanya berobat sendiri saja, dimana hal ini menjadi mayoritas pilihan cara berobat. Namun ada sebagian kecil yang sama sekali tidak berupaya untuk mengobati keluhan kesehatannya (3,09 persen).

Tabel 5.2
Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2023

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Persentase lansia yang tidak berobat jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan				Total
		Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	55,75	1,27	64,27	29,54	4,92	100,00
Perempuan (P)	56,55	1,11	63,76	29,21	5,91	100,00
L + P	56,20	1,18	63,98	29,35	5,48	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	60,81	0,43	62,74	32,92	3,91	100,00
Perempuan (P)	57,60	1,02	63,66	32,95	2,36	100,00
L + P	59,00	0,75	63,25	32,94	3,06	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	58,06	0,87	63,54	31,15	4,44	100,00
Perempuan (P)	57,03	1,07	63,72	30,94	4,27	100,00
L + P	57,48	0,98	63,64	31,03	4,35	100,00

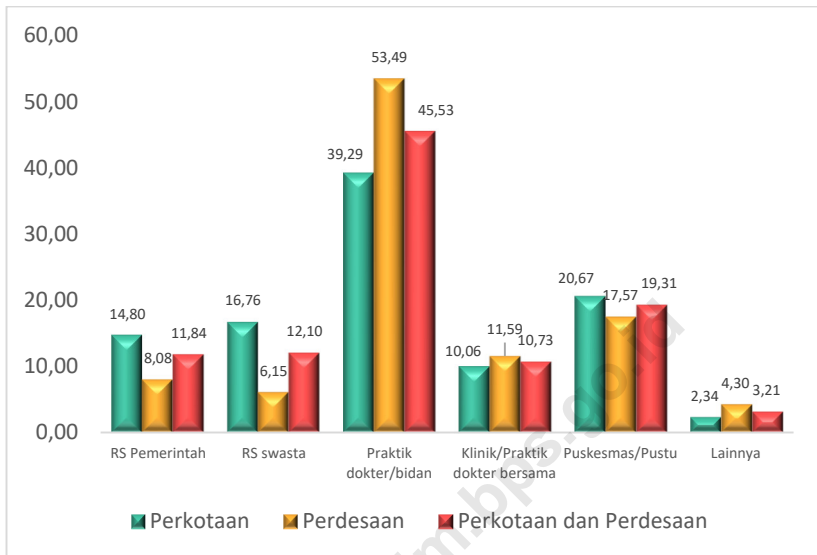
Sumber: Susenas Maret 2022

Kemudian pada Tabel 5.2 menunjukkan masih cukup banyak lansia yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan. Lansia dengan keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan ini mencapai 57,48 persen. Dari total penduduk lansia dengan keluhan

kesehatan tapi tidak berobat jalan tersebut, sebagian besar beralasan bahwa mereka sudah mengobati sendiri keluhan kesehatannya sebesar 63,64 persen dan 31,03 persen yang lain beralasan merasa tidak perlu berobat jalan. Pola yang serupa terjadi pada lansia baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Penduduk lansia yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak ada biaya sebanyak 0,98 persen dari total penduduk lansia yang mengalami kesehatan yang tidak berobat jalan. Alasan tidak ada biaya dalam hal ini baik ketiadaan biaya berobat maupun ketiadaan biaya transportasi menuju tempat berobat. Alasan ketiadaan biaya secara persentase sudah sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya tidak lagi menjadi hambatan utama penduduk lansia untuk berobat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan. Jangkauan jaminan kesehatan nasional hingga wilayah perdesaan yang semakin masif juga mengurangi beban biaya dalam menangani masalah kesehatan lansia.

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten/kota di Jawa Timur dengan persentase penduduk lansia dengan keluhan kesehatan yang tidak berobat jalan tertinggi dengan persentase diatas 75 persen. Kondisi penduduk lansia yang tidak berobat jalan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran publikasi Tabel 5.4 dan 5.4.1 – Tabel 5.4.3.



Catatan: *Lainnya termasuk UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) dan Praktek Batra (Pengobatan Tradisional) termasuk dukun bersalin

Sumber: Susenas Maret 2023

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Lansia dengan Keluhan Kesehatan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Tipe Daerah, 2023

Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap. Dalam hal ini berobat jalan juga termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Pada Gambar 5.2, terlihat tujuan tempat terfavorit lansia untuk berobat jalan yaitu praktik dokter/bidan (45,53 persen). Dalam hal ini, satu orang penduduk lansia yang memiliki keluhan kesehatan bisa berobat jalan ke lebih dari satu tempat layanan kesehatan. Penduduk lansia yang berobat jalan ke

rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta masih lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.

Pada Gambar 5.2 juga terlihat bahwa pilihan penduduk lansia mendatangi klinik praktek/dokter sebagai pilihan utama untuk berobat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Praktek dokter/bidan dianggap sebagai tempat berobat jalan yang praktis dan fleksibel secara waktu untuk mendatanginya. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar penduduk lansia lebih memilih untuk berobat di praktek dokter/bidan. Selain itu, Puskesmas/Pustu menjadi pilihan alternatif lansia untuk berobat jalan karena keberadaannya di setiap kecamatan yang relatif mudah diakses dengan biaya terjangkau.

Berdasarkan kabupaten/kota, data dari lampiran Tabel 5.5.3 menunjukkan bahwa terdapat empat kabupaten/kota yang persentase pemanfaatan puskesmas/puskesmas pembantu tertinggi sebagai tempat utama berobat jalan, yaitu Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Sementara itu, persentase berobat jalan lansia tertinggi di rumah sakit swasta berada di Kota Kediri, Kota Madiun dan Kota Surabaya. Hal sama juga berlaku di Kota Kediri, Kota Madiun dan Kota Surabaya menjadi kabupaten/kota dengan persentase terbesar lansia yang berobat jalan di rumah sakit pemerintah.

6 BAB

KETENAGAKERJAAN

Penduduk lansia yang terlibat aktif dalam ketenagakerjaan merupakan penduduk lansia potensial yaitu penduduk lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lansia potensial ini mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang semestinya tinggal menikmati masa tua tanpa harus bekerja. Kenyataannya masih banyak dijumpai lansia yang bekerja baik itu karena tuntutan hidup atau karena alasan lain.

Usaha pemberdayaan penduduk lansia merupakan salah satu usaha melatih kemandirian, baik dari aspek ekonomis, pemenuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi

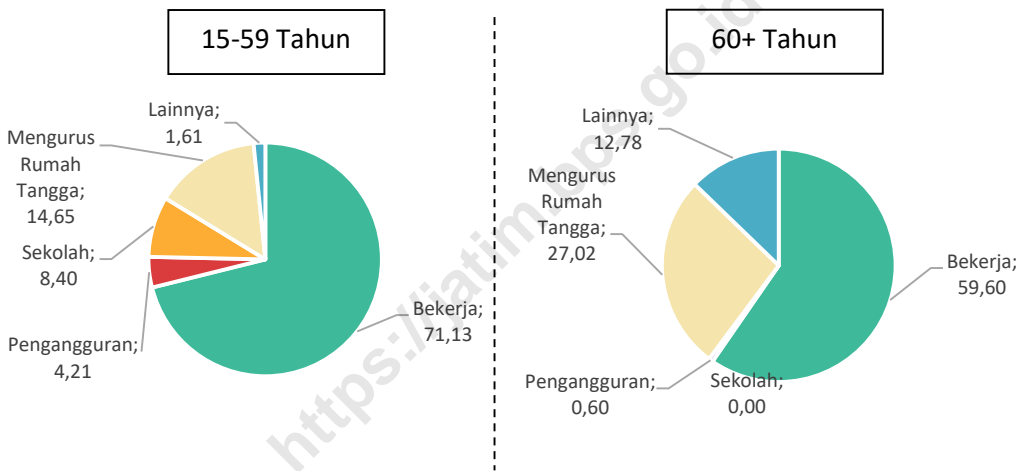
fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Bagi penduduk lansia produktif, hak mendapatkan kesempatan kerja juga tercantum pada UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2)c. Selanjutnya pada Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memberi peluang bagi pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Agar kebijakan ketenagakerjaan penduduk lansia dapat lebih terarah, maka pada bagian ini akan disajikan gambaran secara makro khusus mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Selain itu disajikan pula mengenai indikator ketenagakerjaan lansia yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, jumlah jam kerja dan besaran upah.

6.1. Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur) merupakan lansia potensial. Angkatan kerja lansia ini tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial

banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Gambaran jenis kegiatan lansia Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 6.1.



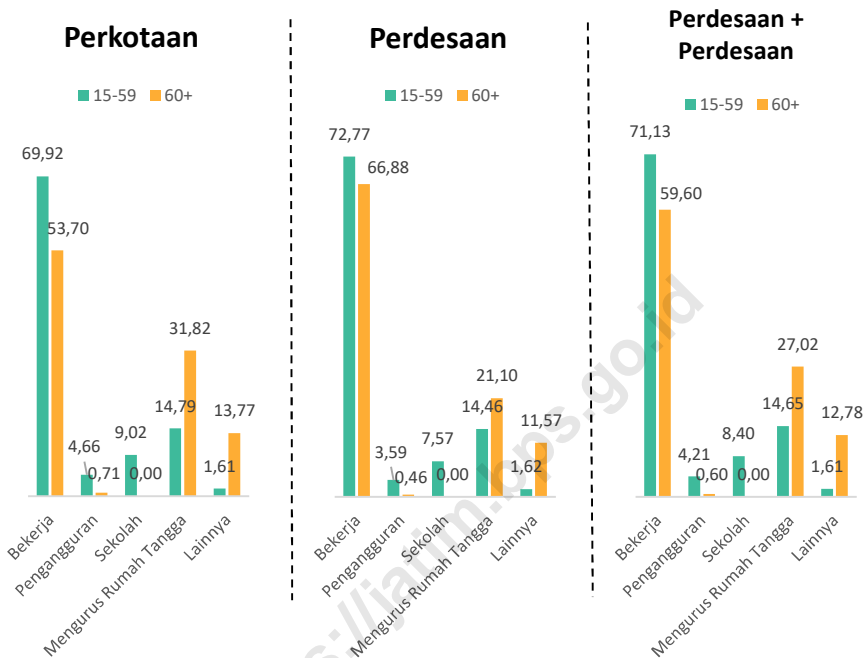
Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Kelompok Usia, 2023

Data Sakernas Agustus 2023 menunjukkan penduduk lansia di Jawa Timur yang bekerja sebesar 59,60 persen. Tingginya persentase penduduk lansia yang bekerja tidak hanya dipandang bahwa mereka masih benar-benar mampu bekerja, namun juga bisa bermakna bahwa tingkat kesejahteraannya relatif masih rendah sehingga di usia senja mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Pada kondisi lebih buruk, para lansia masih ada yang berstatus pengangguran sebesar 0,60 persen. Penduduk lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sebesar 27,02 persen dan melakukan kegiatan lainnya sebesar 12,78 persen. Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini adalah berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya mencakup kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan antara lain berupa kegiatan pengajian, atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Persentase penduduk lansia yang bekerja lebih kecil dibandingkan persentase penduduk usia 15-59 tahun yang bekerja. Demikian juga dengan persentase penduduk lansia yang menganggur. Dari angka ini menjelaskan bahwa penduduk usia 15-59 tahun merupakan usia produktif, sebagian besar penduduk pada kelompok usia tersebut memiliki tanggung jawab lebih terhadap perekonomian keluarga. Sementara itu, untuk kegiatan mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya terlihat bahwa persentase penduduk lansia lebih besar dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun.



Sumber: Sakernas Agustus 2023

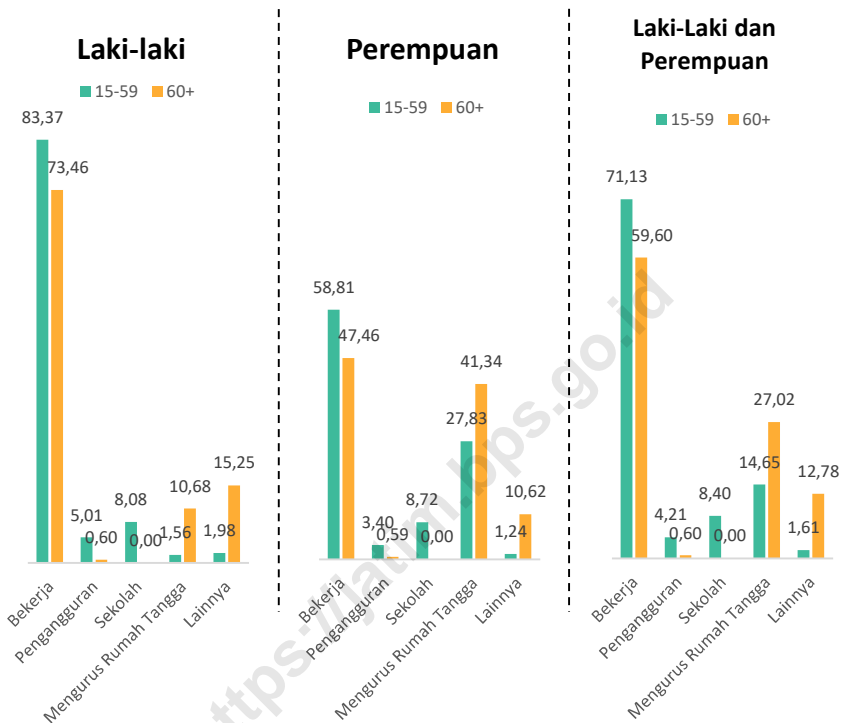
Gambar 6.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2023

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan di perkotaan. Penduduk lansia di perdesaan yang bekerja sebesar 66,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 53,70 persen. Kondisi ini disebabkan karena penduduk lansia di perdesaan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan di perkotaan. Lapangan pekerjaan non formal lebih banyak tersedia di perdesaan, seperti sektor pertanian yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti faktor usia atau

pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, persentase penduduk lansia di perkotaan dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya (31,82 persen dan 13,77 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (21,10 persen dan 11,57 persen).

Persentase penduduk lansia yang bekerja baik di perkotaan maupun di perdesaan lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Perbedaan yang lebih nyata terlihat di daerah perkotaan. Penduduk 15-59 tahun di perkotaan yang bekerja (69,92 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia yang bekerja (53,70 persen).

Kegiatan utama dari penduduk lansia dan penduduk usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 6.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penduduk lansia laki-laki yang bekerja lebih besar dibanding perempuan. Penduduk lansia laki-laki yang bekerja sebesar 73,46 persen, sedangkan perempuan sebesar 47,46 persen. Sementara itu untuk kegiatan mengurus rumah tangga, persentase penduduk lansia perempuan (41,34 persen) jauh lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (10,68 persen). Hal ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peran antara lansia laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kegiatan ekonomi. Perempuan tinggal di rumah fokus dalam mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki fokus bekerja. Pola yang sama juga terlihat pada kelompok usia produktif.

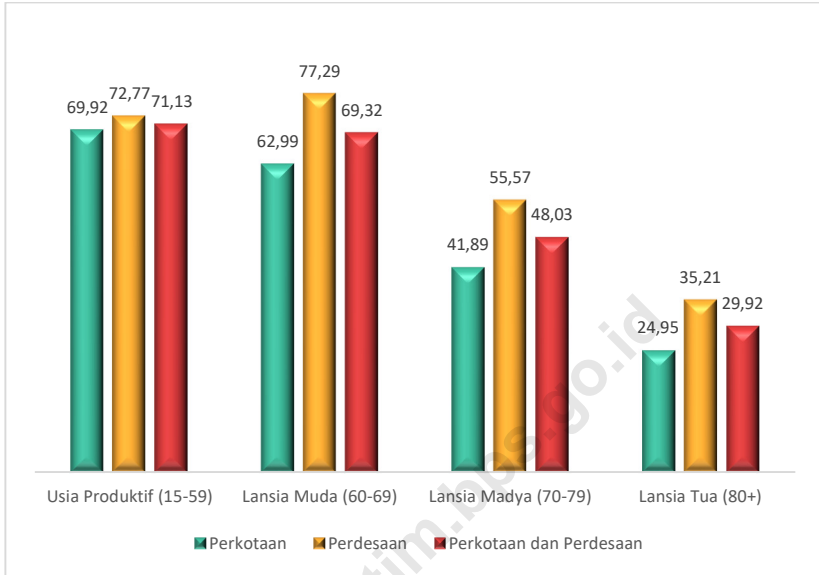


Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2023

6.2. Karakteristik Lansia Bekerja

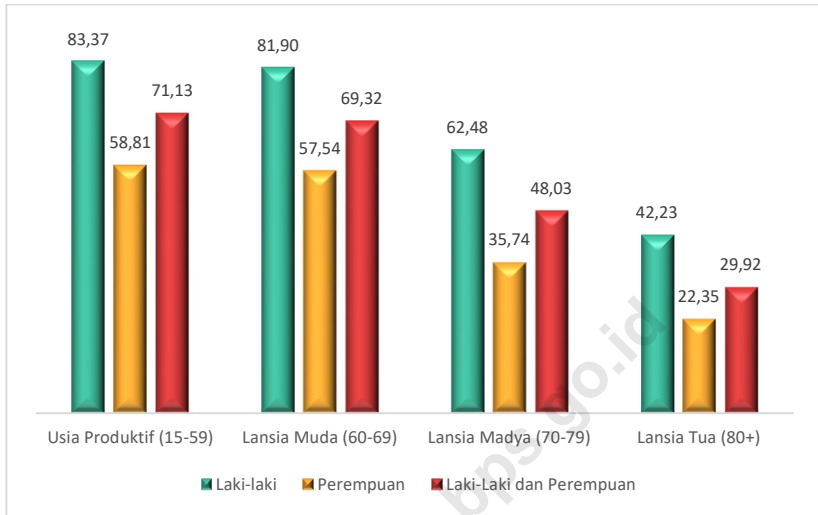
Produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitas akan berbeda antara penduduk usia muda/produktif dengan penduduk lansia. Gambar 6.4 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok usia.



Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Tipe Daerah, 2023

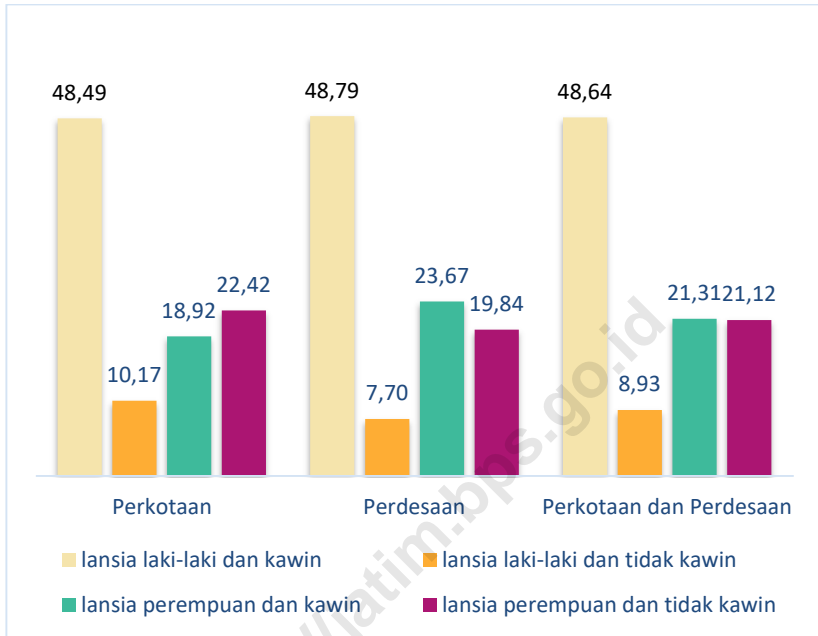
Dari gambar tersebut, terlihat bahwa produktivitas akan cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Pada gambar 6.4 terlihat bahwa pada penduduk lansia tua (usia 80 tahun ke atas) yang bekerja (24,95 persen) di perkotaan mempunyai persentase terkecil dibandingkan dengan kategori lansia yang lain baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase penduduk lansia madya (70-79 tahun) yang bekerja sebesar 48,03 persen lebih rendah dibandingkan lansia muda (60-69 tahun) yang bekerja sebesar 69,32 persen. Faktor kesehatan dan kondisi fisik menjadi penyebab utama rendahnya persentase penduduk lansia pada usia 80 tahun ke atas yang bekerja.



Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2023

Dari gambar 6.5 menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lansia perempuan yang bekerja, baik pada kelompok lansia muda, lansia madya, maupun lansia tua. Semakin tua kategori lansia semakin menurun juga persentase bekerja baik pada lansia laki-laki maupun lansia perempuan.



Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.6

Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2023

Dari total penduduk lansia yang bekerja, sekitar 69,95 persen diantaranya berstatus saat ini kawin yang terdiri dari lansia laki-laki kawin sebesar 48,64 persen dan lansia perempuan kawin sebanyak 21,31 persen. Hampir separuh penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki berstatus kawin. Lansia laki-laki berstatus kawin secara persentase lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan lansia perempuan yang berstatus kawin. Pola yang serupa terlihat pada penduduk lansia di perkotaan dan perdesaan. Hal ini menunjukkan

bahwa alasan umum penduduk lansia yang masih bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Persentase penduduk lansia perempuan berstatus tidak kawin yang bekerja juga cukup besar, yaitu sebesar 21,12 persen.

Tabel 6.1
Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status dalam Rumah Tangga, 2023

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status dalam Rumah Tangga				Total
	Kepala rumah tangga	Istri/suami	Orang tua/mertua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	92,61	0,33	6,15	0,91	100,00
Perempuan (P)	42,90	41,64	13,03	2,42	100,00
L + P	72,06	17,41	8,99	1,54	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	93,49	0,20	5,81	0,50	100,00
Perempuan (P)	35,88	49,32	13,54	1,26	100,00
L + P	68,43	21,57	9,17	0,83	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	93,05	0,27	5,98	0,71	100,00
Perempuan (P)	39,28	45,60	13,29	1,82	100,00
L + P	70,24	19,50	9,08	1,18	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Tidak sedikit penduduk lansia yang masih menghidupi keluarga yang tinggal bersamanya. Penduduk lansia yang masih bekerja dan berstatus sebagai kepala rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Penduduk lansia yang bekerja dan berstatus sebagai kepala rumah tangga sebesar 70,24 persen, berstatus sebagai suami/istri sebesar 19,50 persen, berstatus sebagai orang tua/mertua sebesar 9,08 persen, dan sebesar 1,18 persen berstatus lainnya. Pola yang sama terlihat di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat perbedaan status dalam rumah tangga di antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan yang bekerja. Mayoritas penduduk lansia laki-laki yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dengan persentase sebesar 93,05 persen. Sementara itu, sebagian besar penduduk lansia perempuan yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai istri dari kepala rumah tangga (45,60 persen) dan kepala rumah tangga (39,28 persen).

Tabel 6.2 menunjukkan persentase penduduk lansia yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sebagian besar dari penduduk lansia yang bekerja adalah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah (5,76 persen tidak pernah sekolah, 43,98 persen tidak tamat SD, dan 35,40 persen berpendidikan SD/ sederajat). Sementara itu, persentase penduduk

lansia bekerja yang mempunyai tingkat pendidikan perguruan tinggi relatif kecil hanya sebesar 2,35 persen.

Tabel 6.2
Persentase Penduduk Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)							
Laki-laki	2,57	31,85	37,46	10,91	12,65	4,57	100,00
Perempuan	4,85	43,52	34,57	7,79	6,64	2,64	100,00
L+P	3,53	36,74	36,25	9,60	10,13	3,76	100,00
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	5,84	44,24	40,17	4,80	3,32	1,63	100,00
Perempuan (P)	10,36	58,94	27,71	2,00	0,71	0,28	100,00
L + P	7,86	50,81	34,59	3,54	2,15	1,03	100,00
K + D							
Laki-laki (L)	4,21	38,07	38,82	7,84	7,97	3,09	100,00
Perempuan (P)	7,77	51,70	30,93	4,72	3,49	1,39	100,00
L + P	5,76	43,98	35,40	6,49	6,03	2,35	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Penduduk lansia yang mempunyai pendidikan tinggi umumnya adalah mereka yang dulunya pada saat usia produktif sudah mempunyai pekerjaan yang berkualitas, sehingga pada masa tuanya

tidak perlu lagi bekerja karena sudah mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya tanpa harus bekerja, bisa melalui jaminan pensiun atau tabungan. Berbeda dengan penduduk lansia berpendidikan rendah, yang biasanya bekerja hanya memenuhi kebutuhannya untuk saat ini saja tanpa memikirkan adanya jaminan hari tua. Kondisi tersebut menyebabkan saat mereka memasuki usia lanjut, penduduk lansia yang tidak memiliki tabungan tersebut harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

6.3. Lapangan Usaha

Struktur perekonomian dan potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja penduduk lansia tercermin dari distribusi penduduk lansia yang bekerja menurut lapangan usaha. Dalam publikasi data ketenagakerjaan yang disajikan oleh BPS umumnya mengelompokkan lapangan usaha menjadi 17 sektor. Akan tetapi dalam publikasi ini, lapangan usaha yang melibatkan penduduk lansia dikelompokkan menjadi lima kelompok lapangan usaha utama di Jawa Timur, yaitu sektor pertanian; perdagangan; industri pengolahan; konstruksi; akomodasi dan makan minum.

Tabel 6.3
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah,
dan Lapangan Usaha, 2023

Kelompok Usia/ Tipe Daerah	Lapangan Usaha						Total
	Pertanian	Industri	Konstruksi	Perdagangan	Akomodasi dan Makan Minum	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Usia Produktif (15-49 Tahun)							
Perkotaan	14,27	19,39	7,12	21,99	10,33	26,90	100,00
Perdesaan	42,42	12,74	7,87	16,86	5,15	14,96	100,00
Kota+Desa	26,55	16,49	7,45	19,75	8,07	21,69	100,00
Lansia (60+)							
Perkotaan	40,68	10,81	3,10	22,43	9,63	13,33	100,00
Perdesaan	74,55	6,00	1,53	8,92	3,08	5,93	100,00
Kota+Desa	57,71	8,39	2,31	15,64	6,34	9,61	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023.

Sebagian besar penduduk lansia bekerja di sektor pertanian (57,71 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam ketenagakerjaan lansia. Penduduk lansia di Jawa Timur masih menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan lansia di Jawa Timur yang secara umum masih rendah berhubungan dengan tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa syarat pendidikan maupun keterampilan tertentu.

Terlebih di pedesaan, sektor pertanian menyerap hampir tiga per empat dari total lansia bekerja di daerah tersebut (74,55 persen). Selain pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja lansia adalah sektor perdagangan (15,64 persen).

Tabel 6.4
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kelompok Usia, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha, 2023

Kelompok Usia/ Tipe Daerah	Lapangan Usaha					
	Pertanian	Perdagangan	Industri Pengolahan	Konstruksi	Akomodasi dan Makan Minum	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-59 tahun						
Tidak punya ijazah SD	18,51	5,73	7,18	5,01	6,40	3,86
SD sederajat	46,05	20,77	35,24	20,06	24,68	11,26
SMP sederajat	24,78	20,63	32,03	24,16	28,20	13,14
SMA ke atas	18,90	54,69	33,38	56,68	54,49	74,65
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lansia						
Tidak punya ijazah SD	54,56	28,31	29,43	54,71	42,03	40,04
SD sederajat	37,94	34,14	55,11	43,33	41,16	37,12
SMP sederajat	3,53	11,48	8,99	11,87	16,14	10,65
SMA ke atas	3,82	14,74	14,75	12,24	13,83	25,43
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Dari Tabel 6.4, terlihat bahwa pada penduduk lansia yang bekerja pada lapangan usaha pertanian 92,40 persen diantaranya merupakan lansia yang berpendidikan tamat SD ke bawah (Tamat SD sederajat 37,94 persen dan tidak punya ijazah SD sebesar 54,56 persen). Sementara itu penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian dan berpendidikan SMA keatas hanya sebesar 3,82 persen.

6.4. Status Pekerjaan

Komposisi penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan. Kedudukan seseorang dalam pekerjaan mencerminkan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, status seseorang dalam pekerjaannya dibedakan menjadi (1) berusaha sendiri, (2) berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, (3) berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar, (4) buruh/karyawan/pegawai, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di non pertanian, dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan juga mencerminkan kemandirian dan partisipasi seseorang dalam kegiatan ekonomi.

Persentase penduduk lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh sebesar 34,16 persen merupakan persentase tertinggi dibandingkan status pekerjaan lainnya. Sementara jika dipilah menurut jenis kelamin, lansia laki-laki yang

bekerja berstatus berusaha dibantu buruh mencapai 45,85 persen, sedangkan pada lansia perempuan sebesar 18,30 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di perkotaan masih cukup banyak penduduk lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan (12,67 persen), sedangkan di perdesaan (5,35 persen).

Tabel 6.5
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2023

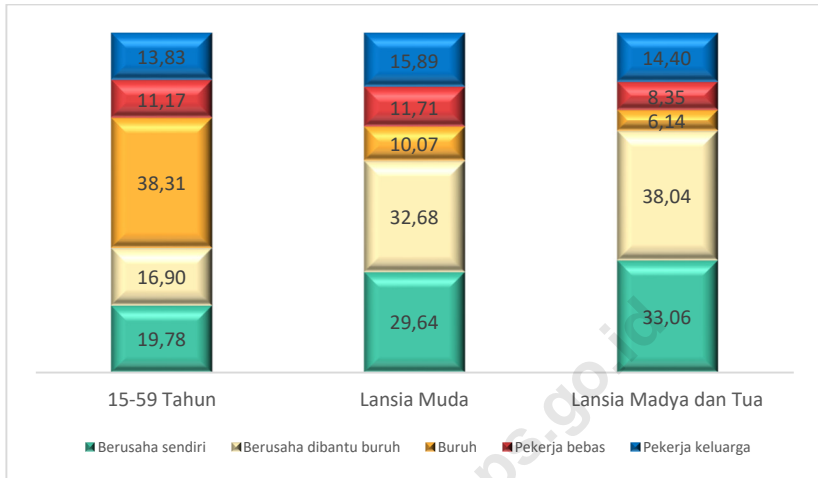
Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	32,64	36,57	13,34	10,88	6,57	100,00
Perempuan (P)	37,88	18,78	11,71	10,26	21,37	100,00
L + P	34,80	29,22	12,67	10,62	12,69	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	24,75	55,37	5,44	11,36	3,07	100,00
Perempuan (P)	28,57	17,85	5,24	10,40	37,94	100,00
L + P	26,41	39,05	5,35	10,94	18,24	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	28,75	45,85	9,44	11,12	4,84	100,00
Perempuan (P)	33,08	18,30	8,37	10,33	29,91	100,00
L + P	30,58	34,16	8,99	10,78	15,48	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Stabilitas pekerjaan dan adanya jaminan pekerjaan menjadi salah satu indikator pekerjaan layak. Pekerjaan layak diindikasikan dengan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya,

pekerjaan berisiko (*precarious work*) adalah pekerjaan yang berjangka pendek dan tidak stabil. Menurut ILO (2011), pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non-pertanian mewakili pekerjaan berisiko di Indonesia. Persentase lansia yang terserap dalam *precarious work* yaitu pekerja bebas adalah sebesar 10,78 persen. Ketidakstabilan pekerjaan ini menyebabkan upah yang diterima lansia tidak menentu yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan lansia dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain untuk menentukan *precarious work*, status pekerjaan juga dapat menentukan apakah lansia termasuk dalam *vulnerable employment*. Termasuk dalam *vulnerable employment* diantaranya adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha sendiri serta pekerja bebas baik pertanian maupun nonpertanian. Status pekerjaan tersebut cenderung tidak formal, tidak memiliki jaminan sosial, dan lebih berisiko untuk bangkrut ketika keadaan ekonomi memburuk (UN, 2012). Persentase lansia yang termasuk dalam *vulnerable employment* di Jawa Timur sebesar 56,85 persen. Lansia dengan pekerjaan yang termasuk dalam *vulnerable employment* cenderung untuk jatuh dalam kemiskinan ketika permintaan menurun.



Sumber: Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Status Pekerjaan, 2023

Bertambahnya usia penduduk lansia selaras dengan pertambahan persentase penduduk lansia yang berusaha, baik berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh (Gambar 6.7). Hal sebaliknya terjadi pada pekerja lansia dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai yang mengalami penurunan persentase seiring bertambahnya usia. Kondisi ini mencerminkan bahwa penduduk yang bekerja secara terikat pada suatu perusahaan cenderung melepaskan statusnya sebagai buruh/karyawan/pegawai seiring dengan bertambahnya usia. Mereka cenderung beralih profesi sebagai pengusaha.

6.5. Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Bertambahnya usia menjadikan kondisi fisik lansia melemah sehingga jumlah jam kerja cenderung berkurang. Apabila lansia bekerja secara berlebihan, kondisi fisik dan mental lansia terancam dalam jangka panjang. Jam kerja berlebih juga akan menurunkan produktivitas pekerjaan (ILO, 2011). Menurut ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak layak dari segi jam kerja. Namun demikian, dari Tabel 6.6. terlihat bahwa persentase penduduk lansia yang bekerja secara berlebihan atau jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu terakhir masih cukup banyak.

Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebihan atau lebih dari 48 jam dalam seminggu terakhir sebesar 22,13 persen. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 5 lansia yang bekerja memiliki jam kerja yang tidak layak atau berlebihan. Lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebihan di perkotaan lebih banyak (25,81 persen) dibandingkan dengan lansia yang berada di perdesaan (19,08 persen).

Tabel 6.6
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah
dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2023

Kelompok Usia/ Jenis Kelamin	Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir					Jumlah
	0 jam	1 – 14 jam	15 – 34 jam	35 – 48 jam	49+ jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Tipe daerah						
Perkotaan (K)	2,33	15,15	29,99	27,56	24,97	100,00
Perdesaan (D)	2,25	17,81	37,76	24,35	17,82	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki (L)	2,77	11,42	32,76	29,62	23,43	100,00
Perempuan (P)	1,65	23,36	35,44	20,97	18,59	100,00
Total	2,29	16,49	33,90	25,95	21,38	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Lansia laki-laki yang bekerja melebihi batas maksimum jam kerja normal sebesar 23,43 persen lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan yang bekerja melebihi batas jam kerja dalam bekerja seminggu yang lalu (18,59 persen). Hal ini dapat disebabkan lansia laki-laki tetap dituntut untuk bekerja demi memenuhi nafkah keluarga meskipun sampai melebihi batas waktu dalam bekerja. Kendati demikian, persentase tertinggi terdapat pada lansia yang bekerja dengan durasi 15-34 jam dalam seminggu sebesar 33,90 persen. Pola ini juga terjadi pada lansia di perkotaan dan perdesaan.

6.6. Upah/Pendapatan

Lebih dari separuh lansia masih berstatus bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak usia produktif yang masih bergantung kepada orang tua atau lansia. Dengan usia sudah lanjut mereka tetap dituntut untuk memperoleh pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya juga sebagai pemenuhan biaya dalam menjaga kesehatannya yang sudah mulai lemah.

Tabel 6.7
Persentase Penduduk Lansia Bekerja
Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Per Bulan, 2023

Tipe daerah/ Jenis Kelamin	Upah/Gaji/Pendapatan				Jumlah
	Kurang dari 1 juta	1 juta – 1,99 juta	2 juta – 2,99 juta	3 juta keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe daerah					
Perkotaan (K)	38,79	29,72	13,45	18,04	100,00
Perdesaan (D)	45,75	30,36	11,28	12,60	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki (L)	33,48	32,31	15,46	18,76	100,00
Perempuan (P)	58,21	25,83	6,76	9,20	100,00
Total	42,18	30,03	12,40	15,40	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Dari Tabel 6.7 di atas, mayoritas lansia pekerja menerima upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan, yaitu sebesar 42,18 persen. Rendahnya upah atau pendapatan ini

disebabkan oleh karena sebagian besar lansia yang bekerja berpendidikan rendah. Berdasarkan tipe daerah, persentase lansia bekerja di perdesaan dengan upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan lebih besar dibandingkan persentase di perkotaan. Selain itu, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah (58,21 persen) per bulan jauh lebih besar dibandingkan persentase lansia laki-laki yang upahnya kurang dari 1 juta (33,48 persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

LAMPIRAN

<https://jatim.bps.go.id>

Lampiran 3.4.1

Persentase Penduduk Lansia Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,37	80,90	0,45	18,28	100,00
02. Ponorogo	0,70	81,16	1,82	16,32	100,00
03. Trenggalek	0,17	87,68	0,15	12,00	100,00
04. Tulungagung	0,37	86,83	2,82	9,99	100,00
05. Blitar	1,35	81,26	3,33	14,06	100,00
06. Kediri	1,08	77,52	0,82	20,58	100,00
07. Malang	0,20	84,09	1,47	14,24	100,00
08. Lumajang	0,96	77,71	1,49	19,83	100,00
09. Jember	0,53	85,18	1,86	12,43	100,00
10. Banyuwangi	1,99	82,19	2,51	13,31	100,00
11. Bondowoso	0,81	84,33	0,68	14,18	100,00
12. Situbondo	–	91,87	1,43	6,70	100,00
13. Probolinggo	1,05	91,39	0,11	7,46	100,00
14. Pasuruan	–	84,23	0,61	15,16	100,00
15. Sidoarjo	–	78,75	0,03	21,22	100,00
16. Mojokerto	–	82,67	2,42	14,91	100,00
17. Jombang	0,28	76,20	1,41	22,11	100,00
18. Nganjuk	0,00	83,41	1,31	15,28	100,00
19. Madiun	0,35	80,65	–	19,01	100,00
20. Magetan	0,85	80,83	1,79	16,53	100,00
21. Ngawi	0,38	90,00	0,21	9,41	100,00
22. Bojonegoro	0,45	82,38	0,33	16,84	100,00
23. Tuban	–	84,79	1,00	14,22	100,00
24. Lamongan	–	82,26	1,57	16,17	100,00
25. Gresik	–	83,81	0,36	15,83	100,00
26. Bangkalan	–	92,23	1,28	6,49	100,00
27. Sampang	0,02	91,33	0,33	8,32	100,00
28. Pamekasan	0,02	88,14	0,15	11,69	100,00
29. Sumenep	–	86,34	0,78	12,88	100,00
71. Kota Kediri	0,05	74,43	1,53	23,99	100,00
72. Kota Blitar	1,22	73,96	2,24	22,58	100,00
73. Kota Malang	0,05	83,65	0,90	15,40	100,00
74. Kota Probolinggo	1,74	79,01	0,69	18,55	100,00
75. Kota Pasuruan	0,46	85,30	1,96	12,28	100,00
76. Kota Mojokerto	1,50	82,79	1,61	14,10	100,00
77. Kota Madiun	0,65	84,90	2,45	12,00	100,00
78. Kota Surabaya	0,50	83,67	1,43	14,40	100,00
79. Kota Batu	0,97	70,92	4,47	23,64	100,00
Jawa Timur	0,48	83,50	1,28	14,75	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 3.4.2

Persentase Penduduk Lansia Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,94	48,69	2,08	48,29	100,00
02. Ponorogo	0,55	42,74	0,79	55,92	100,00
03. Trenggalek	0,94	50,39	5,67	43,00	100,00
04. Tulungagung	0,67	45,42	2,47	51,45	100,00
05. Blitar	0,14	45,93	3,16	50,76	100,00
06. Kediri	0,68	42,71	0,63	55,99	100,00
07. Malang	0,60	48,44	2,80	48,16	100,00
08. Lumajang	0,93	39,06	3,91	56,10	100,00
09. Jember	0,90	40,96	2,33	55,81	100,00
10. Banyuwangi	–	44,49	1,81	53,70	100,00
11. Bondowoso	–	42,85	0,56	56,59	100,00
12. Situbondo	1,26	45,62	0,87	52,25	100,00
13. Probolinggo	1,98	41,94	1,26	54,82	100,00
14. Pasuruan	1,92	37,48	2,26	58,34	100,00
15. Sidoarjo	2,92	44,35	3,32	49,40	100,00
16. Mojokerto	0,96	39,02	5,35	54,67	100,00
17. Jombang	0,69	37,74	3,39	58,19	100,00
18. Nganjuk	0,24	46,99	2,62	50,14	100,00
19. Madiun	0,65	41,30	1,44	56,62	100,00
20. Magetan	0,68	42,80	2,82	53,70	100,00
21. Ngawi	–	47,95	2,80	49,25	100,00
22. Bojonegoro	–	45,07	2,09	52,84	100,00
23. Tuban	–	38,81	2,79	58,40	100,00
24. Lamongan	0,79	39,96	3,05	56,21	100,00
25. Gresik	1,05	38,64	1,01	59,30	100,00
26. Bangkalan	2,43	48,27	0,27	49,02	100,00
27. Sampang	0,01	48,10	0,58	51,30	100,00
28. Pamekasan	0,20	40,12	0,83	58,84	100,00
29. Sumenep	0,12	36,07	1,07	62,74	100,00
71. Kota Kediri	3,38	37,42	6,43	52,77	100,00
72. Kota Blitar	0,23	37,72	3,04	59,00	100,00
73. Kota Malang	1,98	46,62	6,30	45,11	100,00
74. Kota Probolinggo	0,41	33,61	4,22	61,76	100,00
75. Kota Pasuruan	0,31	41,63	2,59	55,48	100,00
76. Kota Mojokerto	1,56	40,39	2,03	56,02	100,00
77. Kota Madiun	3,11	43,76	2,12	51,00	100,00
78. Kota Surabaya	1,10	50,88	2,91	45,11	100,00
79. Kota Batu	–	39,12	4,45	56,44	100,00
Jawa Timur	0,83	43,50	2,40	53,27	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 3.4.3

Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2023

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,68	63,66	1,32	34,35	100,00
02. Ponorogo	0,62	60,76	1,28	37,35	100,00
03. Trenggalek	0,57	68,46	2,99	27,98	100,00
04. Tulungagung	0,52	65,35	2,64	31,49	100,00
05. Blitar	0,74	63,27	3,24	32,75	100,00
06. Kediri	0,87	59,44	0,72	38,97	100,00
07. Malang	0,41	65,37	2,17	32,04	100,00
08. Lumajang	0,94	57,14	2,78	39,14	100,00
09. Jember	0,73	61,79	2,11	35,38	100,00
10. Banyuwangi	0,95	62,55	2,14	34,35	100,00
11. Bondowoso	0,36	61,20	0,61	37,83	100,00
12. Situbondo	0,69	66,71	1,13	31,48	100,00
13. Probolinggo	1,56	64,06	0,75	33,63	100,00
14. Pasuruan	1,06	58,43	1,52	38,99	100,00
15. Sidoarjo	1,54	60,63	1,76	36,06	100,00
16. Mojokerto	0,51	59,61	3,97	35,91	100,00
17. Jombang	0,50	55,49	2,47	41,54	100,00
18. Nganjuk	0,13	64,19	2,00	33,68	100,00
19. Madiun	0,51	59,59	0,77	39,13	100,00
20. Magetan	0,76	59,98	2,35	36,91	100,00
21. Ngawi	0,18	67,49	1,60	30,73	100,00
22. Bojonegoro	0,21	62,41	1,27	36,10	100,00
23. Tuban	-	59,16	2,00	38,84	100,00
24. Lamongan	0,44	58,89	2,39	38,29	100,00
25. Gresik	0,57	59,27	0,71	39,44	100,00
26. Bangkalan	1,37	67,40	0,71	30,51	100,00
27. Sampang	0,01	67,13	0,47	32,38	100,00
28. Pamekasan	0,12	61,31	0,53	38,04	100,00
29. Sumenep	0,07	57,61	0,95	41,38	100,00
71. Kota Kediri	1,87	54,22	4,21	39,70	100,00
72. Kota Blitar	0,70	54,67	2,67	41,96	100,00
73. Kota Malang	1,09	63,60	3,82	31,48	100,00
74. Kota Probolinggo	1,08	56,15	2,47	40,30	100,00
75. Kota Pasuruan	0,38	61,30	2,31	36,02	100,00
76. Kota Mojokerto	1,54	59,29	1,84	37,33	100,00
77. Kota Madiun	2,05	61,60	2,26	34,09	100,00
78. Kota Surabaya	0,81	66,65	2,20	30,34	100,00
79. Kota Batu	0,47	54,52	4,46	40,56	100,00
Jawa Timur	0,66	62,08	1,88	35,38	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 3.5.1
Persentase Penduduk Lansia Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2023

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	81,27	–	17,75	0,98	100,00
02. Ponorogo	85,31	0,86	12,55	1,27	100,00
03. Trenggalek	79,83	–	19,11	1,06	100,00
04. Tulungagung	87,11	1,92	10,97	–	100,00
05. Blitar	87,96	1,94	6,22	3,88	100,00
06. Kediri	79,47	1,04	17,26	2,23	100,00
07. Malang	83,95	1,46	13,95	0,65	100,00
08. Lumajang	81,86	3,04	13,23	1,87	100,00
09. Jember	83,93	1,22	14,52	0,33	100,00
10. Banyuwangi	88,73	1,38	7,74	2,16	100,00
11. Bondowoso	88,61	0,42	10,18	0,79	100,00
12. Situbondo	86,10	1,50	12,41	–	100,00
13. Probolinggo	83,93	–	13,96	2,11	100,00
14. Pasuruan	85,31	2,44	9,84	2,40	100,00
15. Sidoarjo	73,94	0,35	25,67	0,03	100,00
16. Mojokerto	72,94	–	25,33	1,73	100,00
17. Jombang	77,65	0,86	20,91	0,58	100,00
18. Nganjuk	77,96	0,27	21,77	–	100,00
19. Madiun	88,64	1,36	9,32	0,67	100,00
20. Magetan	74,93	0,74	20,63	3,70	100,00
21. Ngawi	88,62	0,40	10,61	0,38	100,00
22. Bojonegoro	81,67	0,60	16,29	1,44	100,00
23. Tuban	74,21	–	25,21	0,58	100,00
24. Lamongan	81,25	1,01	16,78	0,95	100,00
25. Gresik	88,34	–	11,66	–	100,00
26. Bangkalan	95,59	0,40	3,53	0,48	100,00
27. Sampang	91,96	–	5,34	2,71	100,00
28. Pamekasan	93,52	0,02	5,91	0,55	100,00
29. Sumenep	87,62	–	9,15	3,23	100,00
71. Kota Kediri	74,15	0,25	24,51	1,09	100,00
72. Kota Blitar	74,21	1,97	22,93	0,89	100,00
73. Kota Malang	80,91	0,00	19,09	0,00	100,00
74. Kota Probolinggo	76,64	0,00	17,92	5,44	100,00
75. Kota Pasuruan	71,05	0,00	28,48	0,46	100,00
76. Kota Mojokerto	77,61	1,77	19,12	1,50	100,00
77. Kota Madiun	93,33	–	5,87	0,80	100,00
78. Kota Surabaya	89,84	0,65	9,15	0,36	100,00
79. Kota Batu	74,39	2,57	15,99	7,05	100,00
Jawa Timur	83,65	0,88	14,25	1,22	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 3.5.2
Persentase Penduduk Lansia Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2023

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	23,49	40,57	33,42	2,52	100,00
02. Ponorogo	29,57	35,99	31,90	2,54	100,00
03. Trenggalek	22,58	41,32	32,98	3,12	100,00
04. Tulungagung	25,89	37,17	33,81	3,12	100,00
05. Blitar	32,17	38,09	26,27	3,47	100,00
06. Kediri	31,46	35,76	30,89	1,89	100,00
07. Malang	18,31	39,94	37,95	3,79	100,00
08. Lumajang	31,90	31,02	31,27	5,82	100,00
09. Jember	28,16	35,10	32,29	4,46	100,00
10. Banyuwangi	32,77	39,36	26,19	1,69	100,00
11. Bondowoso	24,84	41,86	28,02	5,28	100,00
12. Situbondo	24,85	41,55	30,62	2,97	100,00
13. Probolinggo	11,14	35,56	45,67	7,63	100,00
14. Pasuruan	20,80	33,02	41,41	4,77	100,00
15. Sidoarjo	16,00	34,69	44,14	5,16	100,00
16. Mojokerto	20,77	28,58	44,71	5,93	100,00
17. Jombang	29,68	28,33	39,22	2,77	100,00
18. Nganjuk	26,07	38,44	30,42	5,07	100,00
19. Madiun	38,32	36,18	23,41	2,08	100,00
20. Magetan	27,19	35,61	32,08	5,11	100,00
21. Ngawi	30,03	43,95	23,09	2,93	100,00
22. Bojonegoro	21,02	38,62	36,07	4,29	100,00
23. Tuban	18,06	28,17	48,56	5,21	100,00
24. Lamongan	28,01	32,70	38,50	0,79	100,00
25. Gresik	20,69	32,87	42,72	3,73	100,00
26. Bangkalan	29,48	44,73	21,51	4,27	100,00
27. Sampang	20,65	44,26	28,20	6,88	100,00
28. Pamekasan	27,60	36,37	33,23	2,80	100,00
29. Sumenep	30,27	32,45	30,19	7,09	100,00
71. Kota Kediri	17,42	26,55	51,13	4,91	100,00
72. Kota Blitar	34,02	26,24	37,43	2,31	100,00
73. Kota Malang	23,36	37,55	31,49	7,60	100,00
74. Kota Probolinggo	21,72	30,04	44,79	3,45	100,00
75. Kota Pasuruan	22,36	27,32	47,16	3,16	100,00
76. Kota Mojokerto	18,71	32,78	43,47	5,04	100,00
77. Kota Madiun	39,75	41,54	15,47	3,24	100,00
78. Kota Surabaya	30,96	45,55	23,39	0,10	100,00
79. Kota Batu	19,27	33,04	47,10	0,60	100,00
Jawa Timur	25,70	36,78	33,67	3,85	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 3.5.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2023

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	50,34	21,72	26,14	1,80	100,00
02. Ponorogo	55,71	19,52	22,83	1,94	100,00
03. Trenggalek	50,32	21,30	26,26	2,12	100,00
04. Tulungagung	55,36	20,20	22,81	1,62	100,00
05. Blitar	59,56	20,35	16,43	3,67	100,00
06. Kediri	54,53	19,08	24,34	2,06	100,00
07. Malang	49,50	21,66	26,55	2,30	100,00
08. Lumajang	55,26	17,93	22,83	3,97	100,00
09. Jember	54,43	19,14	23,92	2,51	100,00
10. Banyuwangi	59,58	21,16	17,35	1,91	100,00
11. Bondowoso	53,05	23,53	20,13	3,29	100,00
12. Situbondo	52,78	23,29	22,32	1,62	100,00
13. Probolinggo	43,71	19,65	31,48	5,16	100,00
14. Pasuruan	49,70	19,32	27,27	3,71	100,00
15. Sidoarjo	43,41	18,45	35,40	2,74	100,00
16. Mojokerto	45,39	15,09	35,57	3,95	100,00
17. Jombang	51,82	15,65	30,77	1,76	100,00
18. Nganjuk	50,57	20,41	26,34	2,67	100,00
19. Madiun	61,72	20,00	16,86	1,42	100,00
20. Magetan	48,77	19,85	26,91	4,47	100,00
21. Ngawi	57,25	23,71	17,29	1,75	100,00
22. Bojonegoro	49,21	20,94	26,88	2,97	100,00
23. Tuban	42,91	15,70	38,23	3,16	100,00
24. Lamongan	51,83	18,52	28,78	0,86	100,00
25. Gresik	51,59	17,85	28,53	2,02	100,00
26. Bangkalan	58,26	25,44	13,68	2,62	100,00
27. Sampang	52,03	24,78	18,14	5,05	100,00
28. Pamekasan	56,68	20,33	21,18	1,80	100,00
29. Sumenep	54,84	18,55	21,18	5,44	100,00
71. Kota Kediri	43,18	14,61	39,04	3,17	100,00
72. Kota Blitar	52,82	14,88	30,64	1,65	100,00
73. Kota Malang	49,76	20,33	25,80	4,11	100,00
74. Kota Probolinggo	48,99	15,12	31,44	4,44	100,00
75. Kota Pasuruan	44,29	15,01	38,75	1,95	100,00
76. Kota Mojokerto	44,97	18,95	32,62	3,46	100,00
77. Kota Madiun	62,99	23,52	11,31	2,18	100,00
78. Kota Surabaya	59,27	23,96	16,54	0,23	100,00
79. Kota Batu	45,96	18,29	32,03	3,72	100,00
Jawa Timur	52,61	20,11	24,65	2,63	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.1.1
Persentase Penduduk Lansia Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Kabupaten/Kota	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	75,60	10,38	14,02	100,00
02. Ponorogo	79,41	8,75	11,84	100,00
03. Trenggalek	75,11	12,94	11,95	100,00
04. Tulungagung	67,94	11,37	20,69	100,00
05. Blitar	83,54	6,41	10,05	100,00
06. Kediri	73,55	12,03	14,42	100,00
07. Malang	74,15	11,34	14,51	100,00
08. Lumajang	78,15	12,35	9,50	100,00
09. Jember	80,07	9,37	10,56	100,00
10. Banyuwangi	75,16	6,48	18,35	100,00
11. Bondowoso	83,86	2,44	13,69	100,00
12. Situbondo	79,34	4,16	16,50	100,00
13. Probolinggo	82,71	7,04	10,25	100,00
14. Pasuruan	83,32	6,44	10,24	100,00
15. Sidoarjo	46,35	23,51	30,14	100,00
16. Mojokerto	73,58	13,21	13,21	100,00
17. Jombang	58,54	16,65	24,81	100,00
18. Nganjuk	66,67	13,65	19,68	100,00
19. Madiun	77,36	11,93	10,71	100,00
20. Magetan	72,01	13,43	14,56	100,00
21. Ngawi	74,83	10,86	14,31	100,00
22. Bojonegoro	82,26	9,29	8,44	100,00
23. Tuban	82,82	10,47	6,71	100,00
24. Lamongan	78,03	8,68	13,30	100,00
25. Gresik	67,30	13,80	18,90	100,00
26. Bangkalan	83,22	6,81	9,97	100,00
27. Sampang	95,12	2,15	2,73	100,00
28. Pamekasan	84,77	3,69	11,54	100,00
29. Sumenep	88,45	2,60	8,95	100,00
71. Kota Kediri	33,10	15,02	51,87	100,00
72. Kota Blitar	50,26	9,17	40,57	100,00
73. Kota Malang	32,63	19,11	48,26	100,00
74. Kota Probolinggo	49,15	7,51	43,34	100,00
75. Kota Pasuruan	53,46	12,45	34,08	100,00
76. Kota Mojokerto	40,39	16,03	43,58	100,00
77. Kota Madiun	27,94	15,20	56,87	100,00
78. Kota Surabaya	25,08	11,77	63,15	100,00
79. Kota Batu	62,52	12,00	25,49	100,00
Jawa Timur	71,61	10,43	17,95	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.1.2
Persentase Penduduk Lansia Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Kabupaten/Kota	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	83,16	8,44	8,40	100,00
02. Ponorogo	88,04	4,63	7,32	100,00
03. Trenggalek	82,42	9,00	8,58	100,00
04. Tulungagung	84,94	4,77	10,29	100,00
05. Blitar	84,05	9,71	6,23	100,00
06. Kediri	79,37	8,88	11,75	100,00
07. Malang	86,09	5,51	8,40	100,00
08. Lumajang	86,53	4,33	9,14	100,00
09. Jember	90,49	4,19	5,32	100,00
10. Banyuwangi	80,43	8,59	10,98	100,00
11. Bondowoso	94,48	1,68	3,85	100,00
12. Situbondo	92,40	3,82	3,77	100,00
13. Probolinggo	90,91	3,99	5,10	100,00
14. Pasuruan	90,91	4,24	4,85	100,00
15. Sidoarjo	58,02	14,48	27,50	100,00
16. Mojokerto	89,30	4,33	6,37	100,00
17. Jombang	81,04	9,26	9,71	100,00
18. Nganjuk	84,21	6,49	9,30	100,00
19. Madiun	91,48	4,44	4,08	100,00
20. Magetan	81,14	8,99	9,87	100,00
21. Ngawi	87,61	5,07	7,32	100,00
22. Bojonegoro	91,84	4,26	3,91	100,00
23. Tuban	93,11	2,37	4,52	100,00
24. Lamongan	86,13	4,99	8,88	100,00
25. Gresik	75,66	6,26	18,08	100,00
26. Bangkalan	90,84	3,25	5,91	100,00
27. Sampang	98,18	1,36	0,46	100,00
28. Pamekasan	92,68	1,68	5,63	100,00
29. Sumenep	94,62	1,57	3,80	100,00
71. Kota Kediri	54,59	16,14	29,26	100,00
72. Kota Blitar	55,04	15,94	29,02	100,00
73. Kota Malang	50,31	11,14	38,56	100,00
74. Kota Probolinggo	64,16	13,72	22,11	100,00
75. Kota Pasuruan	68,30	11,16	20,54	100,00
76. Kota Mojokerto	48,28	21,81	29,91	100,00
77. Kota Madiun	39,27	21,37	39,36	100,00
78. Kota Surabaya	44,98	12,25	42,78	100,00
79. Kota Batu	73,87	7,16	18,97	100,00
Jawa Timur	82,55	6,44	11,01	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.1.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Kabupaten/Kota	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederaja ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	79,65	9,34	11,01	100,00
02. Ponorogo	83,99	6,56	9,44	100,00
03. Trenggalek	78,88	10,91	10,21	100,00
04. Tulungagung	76,76	7,95	15,30	100,00
05. Blitar	83,80	8,09	8,11	100,00
06. Kediri	76,57	10,40	13,03	100,00
07. Malang	80,42	8,28	11,30	100,00
08. Lumajang	82,61	8,08	9,31	100,00
09. Jember	85,58	6,63	7,79	100,00
10. Banyuwangi	77,91	7,58	14,51	100,00
11. Bondowoso	89,78	2,01	8,20	100,00
12. Situbondo	86,45	3,98	9,58	100,00
13. Probolinggo	87,24	5,35	7,40	100,00
14. Pasuruan	87,51	5,23	7,26	100,00
15. Sidoarjo	52,50	18,75	28,75	100,00
16. Mojokerto	81,88	8,52	9,60	100,00
17. Jombang	70,65	12,67	16,68	100,00
18. Nganjuk	75,93	9,87	14,20	100,00
19. Madiun	84,91	7,92	7,16	100,00
20. Magetan	77,02	11,00	11,99	100,00
21. Ngawi	81,67	7,76	10,57	100,00
22. Bojonegoro	87,39	6,60	6,01	100,00
23. Tuban	88,56	5,95	5,49	100,00
24. Lamongan	82,50	6,64	10,86	100,00
25. Gresik	71,84	9,70	18,45	100,00
26. Bangkalan	87,52	4,80	7,68	100,00
27. Sampang	96,83	1,70	1,46	100,00
28. Pamekasan	89,19	2,57	8,24	100,00
29. Sumenep	91,98	2,01	6,01	100,00
71. Kota Kediri	44,84	15,64	39,53	100,00
72. Kota Blitar	52,80	12,77	34,42	100,00
73. Kota Malang	42,20	14,79	43,01	100,00
74. Kota Probolinggo	56,71	10,64	32,65	100,00
75. Kota Pasuruan	61,62	11,74	26,64	100,00
76. Kota Mojokerto	44,76	19,23	36,01	100,00
77. Kota Madiun	34,35	18,69	46,95	100,00
78. Kota Surabaya	35,41	12,02	52,57	100,00
79. Kota Batu	68,37	9,50	22,13	100,00
Jawa Timur	77,47	8,29	14,24	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.2.1
Persentase Penduduk Lansia Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	43,13	0,54	47,80	8,53	100,00
02. Ponorogo	44,85	2,13	31,92	21,11	100,00
03. Trenggalek	28,12	1,83	57,91	12,13	100,00
04. Tulungagung	38,57	–	52,41	9,02	100,00
05. Blitar	45,30	0,42	42,96	11,32	100,00
06. Kediri	29,11	0,62	56,34	13,94	100,00
07. Malang	32,35	2,19	53,81	11,66	100,00
08. Lumajang	31,55	2,02	52,65	13,79	100,00
09. Jember	29,38	2,07	38,22	30,33	100,00
10. Banyuwangi	28,48	1,32	54,68	15,52	100,00
11. Bondowoso	23,43	5,93	39,99	30,65	100,00
12. Situbondo	38,41	0,48	23,34	37,77	100,00
13. Probolinggo	25,61	6,09	35,19	33,11	100,00
14. Pasuruan	13,06	5,13	68,07	13,74	100,00
15. Sidoarjo	34,01	2,46	59,23	4,30	100,00
16. Mojokerto	32,72	2,79	50,17	14,32	100,00
17. Jombang	58,98	0,55	34,19	6,28	100,00
18. Nganjuk	54,60	5,15	28,69	11,56	100,00
19. Madiun	49,02	2,33	28,39	20,27	100,00
20. Magetan	77,47	0,30	12,33	9,90	100,00
21. Ngawi	40,03	0,88	39,77	19,31	100,00
22. Bojonegoro	39,19	0,71	39,29	20,81	100,00
23. Tuban	26,11	1,39	50,48	22,02	100,00
24. Lamongan	19,38	0,85	69,50	10,27	100,00
25. Gresik	34,62	0,45	57,52	7,42	100,00
26. Bangkalan	13,98	11,01	42,44	32,57	100,00
27. Sampang	14,71	17,12	16,42	51,75	100,00
28. Pamekasan	2,69	14,87	60,37	22,06	100,00
29. Sumenep	9,00	13,32	38,92	38,76	100,00
71. Kota Kediri	49,81	1,43	45,95	2,81	100,00
72. Kota Blitar	44,81	0,00	51,99	3,20	100,00
73. Kota Malang	29,73	3,41	62,37	4,50	100,00
74. Kota Probolinggo	70,38	0,00	21,90	7,71	100,00
75. Kota Pasuruan	58,21	–	34,47	7,32	100,00
76. Kota Mojokerto	47,45	–	49,95	2,59	100,00
77. Kota Madiun	54,65	–	43,70	1,65	100,00
78. Kota Surabaya	43,98	0,20	54,99	0,84	100,00
79. Kota Batu	46,79	1,48	50,00	1,73	100,00
Jawa Timur	34,31	2,84	46,28	16,57	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.2.2
Persentase Penduduk Lansia Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	43,02	3,92	31,13	21,93	100,00
02. Ponorogo	35,32	1,06	25,83	37,79	100,00
03. Trenggalek	29,98	1,87	40,90	27,25	100,00
04. Tulungagung	37,59	2,45	39,28	20,68	100,00
05. Blitar	41,87	0,73	41,85	15,54	100,00
06. Kediri	26,95	0,99	40,85	31,22	100,00
07. Malang	28,56	1,56	37,38	32,50	100,00
08. Lumajang	27,43	2,89	42,88	26,80	100,00
09. Jember	22,06	2,42	24,20	51,33	100,00
10. Banyuwangi	26,63	2,76	39,90	30,71	100,00
11. Bondowoso	13,21	3,35	24,00	59,45	100,00
12. Situbondo	25,96	4,54	14,22	55,27	100,00
13. Probolinggo	19,59	4,01	14,99	61,40	100,00
14. Pasuruan	18,42	7,91	47,03	26,65	100,00
15. Sidoarjo	38,04	0,97	49,81	11,17	100,00
16. Mojokerto	32,39	3,04	41,04	23,53	100,00
17. Jombang	53,60	1,54	21,28	23,58	100,00
18. Nganjuk	47,93	5,95	16,75	29,36	100,00
19. Madiun	36,90	1,86	20,02	41,22	100,00
20. Magetan	68,67	0,31	8,28	22,75	100,00
21. Ngawi	35,76	1,55	23,11	39,58	100,00
22. Bojonegoro	34,66	1,19	27,07	37,07	100,00
23. Tuban	18,62	2,76	32,53	46,09	100,00
24. Lamongan	18,42	0,82	55,68	25,08	100,00
25. Gresik	32,01	0,94	53,76	13,29	100,00
26. Bangkalan	10,97	13,97	31,22	43,84	100,00
27. Sampang	9,15	16,38	11,21	63,27	100,00
28. Pamekasan	2,94	14,47	31,64	50,95	100,00
29. Sumenep	5,57	14,59	22,71	57,13	100,00
71. Kota Kediri	43,48	3,21	46,82	6,49	100,00
72. Kota Blitar	48,91	0,00	45,82	5,28	100,00
73. Kota Malang	34,90	2,44	47,95	14,70	100,00
74. Kota Probolinggo	60,40	1,86	11,59	26,14	100,00
75. Kota Pasuruan	42,79	2,69	31,03	23,51	100,00
76. Kota Mojokerto	49,36	–	42,62	8,02	100,00
77. Kota Madiun	59,24	0,79	36,17	3,79	100,00
78. Kota Surabaya	47,92	0,56	44,63	6,88	100,00
79. Kota Batu	41,87	2,96	44,09	11,07	100,00
Jawa Timur	30,61	3,46	33,44	32,49	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 4.2.3
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	43,07	2,35	38,88	15,70	100,00
02. Ponorogo	39,79	1,56	28,69	29,97	100,00
03. Trenggalek	29,08	1,85	49,14	19,92	100,00
04. Tulungagung	38,06	1,27	45,60	15,07	100,00
05. Blitar	43,56	0,58	42,39	13,47	100,00
06. Kediri	27,98	0,81	48,29	22,92	100,00
07. Malang	30,36	1,86	45,18	22,60	100,00
08. Lumajang	29,35	2,48	47,45	20,71	100,00
09. Jember	25,51	2,25	30,80	41,44	100,00
10. Banyuwangi	27,52	2,07	46,98	23,43	100,00
11. Bondowoso	17,73	4,49	31,07	46,71	100,00
12. Situbondo	31,64	2,69	18,38	47,29	100,00
13. Probolinggo	22,28	4,94	24,03	48,74	100,00
14. Pasuruan	16,01	6,67	56,46	20,87	100,00
15. Sidoarjo	36,14	1,68	54,27	7,92	100,00
16. Mojokerto	32,55	2,92	45,34	19,18	100,00
17. Jombang	56,08	1,08	27,24	15,60	100,00
18. Nganjuk	51,08	5,58	22,39	20,95	100,00
19. Madiun	42,53	2,07	23,91	31,48	100,00
20. Magetan	72,65	0,30	10,11	16,94	100,00
21. Ngawi	37,74	1,24	30,85	30,16	100,00
22. Bojonegoro	36,77	0,97	32,75	29,51	100,00
23. Tuban	21,94	2,15	40,47	35,43	100,00
24. Lamongan	18,85	0,84	61,86	18,45	100,00
25. Gresik	33,20	0,72	55,48	10,61	100,00
26. Bangkalan	12,28	12,68	36,10	38,93	100,00
27. Sampang	11,60	16,70	13,50	58,20	100,00
28. Pamekasan	2,83	14,65	44,31	38,21	100,00
29. Sumenep	7,04	14,05	29,65	49,26	100,00
71. Kota Kediri	46,35	2,40	46,42	4,82	100,00
72. Kota Blitar	46,99	–	48,71	4,31	100,00
73. Kota Malang	32,53	2,89	54,56	10,02	100,00
74. Kota Probolinggo	65,36	0,94	16,71	16,99	100,00
75. Kota Pasuruan	49,73	1,48	32,58	16,22	100,00
76. Kota Mojokerto	48,51	–	45,89	5,60	100,00
77. Kota Madiun	57,25	0,45	39,44	2,86	100,00
78. Kota Surabaya	46,02	0,39	49,61	3,98	100,00
79. Kota Batu	44,26	2,25	46,95	6,55	100,00
Jawa Timur	32,33	3,17	39,41	25,10	100,00

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	36,57	36,66	36,62
02. Ponorogo	39,93	43,21	41,67
03. Trenggalek	34,38	41,29	37,94
04. Tulungagung	33,24	40,18	36,84
05. Blitar	43,09	55,71	49,51
06. Kediri	38,36	36,80	37,55
07. Malang	29,33	38,07	33,92
08. Lumajang	34,43	38,99	36,86
09. Jember	45,43	42,64	43,96
10. Banyuwangi	37,52	47,18	42,55
11. Bondowoso	44,72	46,17	45,53
12. Situbondo	39,28	30,92	34,73
13. Probolinggo	30,60	40,88	36,28
14. Pasuruan	20,98	23,67	22,46
15. Sidoarjo	34,71	40,61	37,81
16. Mojokerto	40,50	40,33	40,41
17. Jombang	45,73	52,52	49,38
18. Nganjuk	37,84	47,52	42,95
19. Madiun	33,29	38,91	36,30
20. Magetan	40,42	40,77	40,61
21. Ngawi	38,77	41,82	40,40
22. Bojonegoro	30,91	40,67	36,13
23. Tuban	31,96	29,98	30,86
24. Lamongan	37,90	46,92	42,88
25. Gresik	30,37	31,72	31,10
26. Bangkalan	37,58	38,64	38,18
27. Sampang	58,12	54,98	56,36
28. Pamekasan	46,31	44,62	45,37
29. Sumenep	30,43	26,66	28,28
71. Kota Kediri	29,40	31,57	30,59
72. Kota Blitar	32,58	30,02	31,21
73. Kota Malang	34,85	39,01	37,10
74. Kota Probolinggo	29,23	44,90	37,12
75. Kota Pasuruan	51,64	50,83	51,20
76. Kota Mojokerto	31,97	34,30	33,26
77. Kota Madiun	42,25	54,57	49,23
78. Kota Surabaya	35,25	43,54	39,56
79. Kota Batu	29,09	45,87	37,74
Jawa Timur	36,78	40,89	38,98

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.4
Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	38,42	25,22	31,34
02. Ponorogo	39,95	39,33	39,61
03. Trenggalek	44,98	51,45	48,61
04. Tulungagung	32,08	24,08	27,56
05. Blitar	38,83	46,67	43,32
06. Kediri	43,47	36,08	39,71
07. Malang	49,63	54,14	52,29
08. Lumajang	55,61	50,63	52,80
09. Jember	34,17	34,98	34,59
10. Banyuwangi	28,37	35,01	32,21
11. Bondowoso	46,09	39,80	42,54
12. Situbondo	45,56	47,94	46,71
13. Probolinggo	37,30	39,62	38,75
14. Pasuruan	39,73	39,45	39,57
15. Sidoarjo	49,28	41,41	44,83
16. Mojokerto	45,62	41,93	43,68
17. Jombang	54,52	51,54	52,82
18. Nganjuk	33,85	42,12	38,68
19. Madiun	45,46	52,89	49,72
20. Magetan	36,06	33,17	34,47
21. Ngawi	35,64	52,57	45,02
22. Bojonegoro	31,23	20,59	24,82
23. Tuban	36,76	38,29	37,59
24. Lamongan	44,18	55,94	51,29
25. Gresik	52,59	56,72	54,88
26. Bangkalan	30,05	42,66	37,26
27. Sampang	63,44	52,21	57,31
28. Pamekasan	42,21	34,12	37,76
29. Sumenep	27,75	39,38	34,02
71. Kota Kediri	47,35	34,81	40,28
72. Kota Blitar	41,23	27,57	34,24
73. Kota Malang	37,45	39,98	38,89
74. Kota Probolinggo	60,37	44,48	50,69
75. Kota Pasuruan	43,95	58,64	51,97
76. Kota Mojokerto	68,93	76,01	72,98
77. Kota Madiun	39,82	64,46	55,29
78. Kota Surabaya	53,55	53,40	53,46
79. Kota Batu	40,79	50,06	46,60
Jawa Timur	41,94	42,97	42,52

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.4.1
Persentase Penduduk Lansia Laki-laki yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	–	70,33	23,82	5,84	61,58
02. Ponorogo	–	65,29	34,71	–	60,05
03. Trenggalek	2,37	56,50	39,68	1,45	55,02
04. Tulungagung	1,35	58,73	34,82	5,10	67,92
05. Blitar	–	73,44	22,53	4,03	61,17
06. Kediri	–	62,71	24,18	13,11	56,53
07. Malang	–	65,09	29,65	5,26	50,37
08. Lumajang	3,76	56,97	36,92	2,34	44,39
09. Jember	–	65,87	29,41	4,71	65,83
10. Banyuwangi	–	79,01	19,30	1,68	71,63
11. Bondowoso	0,07	67,92	30,69	1,33	53,91
12. Situbondo	4,20	71,88	23,92	–	54,44
13. Probolinggo	–	46,84	42,08	11,09	62,70
14. Pasuruan	10,23	38,84	45,61	5,32	60,27
15. Sidoarjo	–	55,45	44,55	–	50,72
16. Mojokerto	–	66,72	33,28	–	54,38
17. Jombang	–	71,95	22,28	5,77	45,48
18. Nganjuk	–	71,79	27,06	1,15	66,15
19. Madiun	1,34	53,07	45,59	–	54,54
20. Magetan	–	66,75	31,44	1,81	63,94
21. Ngawi	0,27	34,89	64,84	–	64,36
22. Bojonegoro	–	70,79	24,69	4,52	68,77
23. Tuban	–	64,86	23,93	11,21	63,24
24. Lamongan	–	64,62	29,08	6,30	55,82
25. Gresik	–	50,06	41,08	8,86	47,41
26. Bangkalan	0,86	53,84	43,58	1,72	69,95
27. Sampang	–	69,09	15,47	15,44	36,56
28. Pamekasan	0,69	65,62	28,85	4,85	57,79
29. Sumenep	7,92	42,05	45,26	4,78	72,25
71. Kota Kediri	–	61,63	38,37	–	52,65
72. Kota Blitar	–	85,56	8,36	6,08	58,77
73. Kota Malang	3,43	56,63	25,87	14,07	62,55
74. Kota Probolinggo	–	71,40	28,60	–	39,63
75. Kota Pasuruan	–	88,13	11,12	0,75	56,05
76. Kota Mojokerto	–	63,45	36,55	–	31,07
77. Kota Madiun	–	52,86	43,59	3,56	60,18
78. Kota Surabaya	2,15	74,95	20,41	2,49	46,45
79. Kota Batu	–	50,39	35,10	14,51	59,21
Jawa Timur	0,87	63,54	31,15	4,44	58,06

Sumber: Susenas Maret 2023

Lampiran 5.4.2

Persentase Penduduk Lansia Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,59	69,41	27,60	2,40	74,78
02. Ponorogo	1,33	71,99	24,88	1,80	60,67
03. Trenggalek	–	57,93	36,73	5,34	48,55
04. Tulungagung	–	69,22	28,37	2,41	75,92
05. Blitar	–	75,79	22,58	1,63	53,33
06. Kediri	0,88	65,55	26,95	6,62	63,92
07. Malang	2,77	57,55	33,38	6,31	45,86
08. Lumajang	2,62	54,52	42,85	–	49,37
09. Jember	–	66,36	29,19	4,46	65,02
10. Banyuwangi	1,35	74,11	19,33	5,21	64,99
11. Bondowoso	2,74	63,68	32,66	0,91	60,20
12. Situbondo	–	74,12	23,25	2,63	52,06
13. Probolinggo	1,17	47,52	41,31	10,00	60,38
14. Pasuruan	0,11	46,73	49,92	3,24	60,55
15. Sidoarjo	–	66,18	26,41	7,40	58,59
16. Mojokerto	–	73,26	21,90	4,84	58,07
17. Jombang	–	56,10	27,77	16,13	48,46
18. Nganjuk	2,62	59,03	35,16	3,20	57,88
19. Madiun	–	36,81	57,65	5,53	47,11
20. Magetan	–	75,32	23,91	0,77	66,83
21. Ngawi	–	55,20	44,80	–	47,43
22. Bojonegoro	–	74,44	22,35	3,20	79,41
23. Tuban	–	70,43	29,57	–	61,71
24. Lamongan	–	48,79	46,78	4,43	44,06
25. Gresik	–	52,97	44,70	2,33	43,28
26. Bangkalan	6,37	38,71	54,92	–	57,34
27. Sampang	3,31	90,56	6,13	–	47,79
28. Pamekasan	1,61	61,37	36,61	0,40	65,88
29. Sumenep	–	53,45	40,99	5,56	60,62
71. Kota Kediri	–	56,97	33,15	9,88	65,19
72. Kota Blitar	–	78,10	13,09	8,81	72,43
73. Kota Malang	3,42	53,58	27,27	15,74	60,02
74. Kota Probolinggo	–	66,29	32,51	1,20	55,52
75. Kota Pasuruan	–	87,11	7,44	5,45	41,36
76. Kota Mojokerto	–	58,13	35,11	6,76	23,99
77. Kota Madiun	3,45	62,30	34,24	–	35,54
78. Kota Surabaya	3,24	65,96	28,32	2,48	46,60
79. Kota Batu	–	38,67	48,14	13,18	49,94
Jawa Timur	1,07	63,72	30,94	4,27	57,03

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.4.3
Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,34	69,79	26,03	3,83	68,66
02. Ponorogo	0,74	69,00	29,27	1,00	60,39
03. Trenggalek	1,12	57,26	38,12	3,51	51,39
04. Tulungagung	0,55	64,95	31,00	3,50	72,44
05. Blitar	–	74,71	22,56	2,74	56,68
06. Kediri	0,48	64,24	25,67	9,61	60,29
07. Malang	1,57	60,82	31,76	5,85	47,71
08. Lumajang	3,09	55,53	40,42	0,96	47,20
09. Jember	–	66,12	29,30	4,58	65,41
10. Banyuwangi	0,75	76,30	19,32	3,64	67,79
11. Bondowoso	1,65	65,41	31,86	1,08	57,46
12. Situbondo	2,21	72,94	23,60	1,24	53,29
13. Probolinggo	0,72	47,25	41,61	10,42	61,25
14. Pasuruan	4,33	43,44	48,12	4,11	60,43
15. Sidoarjo	–	61,90	33,65	4,45	55,17
16. Mojokerto	–	70,28	27,09	2,63	56,32
17. Jombang	–	62,63	25,51	11,86	47,18
18. Nganjuk	1,44	64,75	31,52	2,28	61,32
19. Madiun	0,62	44,33	52,07	2,97	50,28
20. Magetan	–	71,56	27,22	1,22	65,53
21. Ngawi	0,14	44,60	55,26	–	54,98
22. Bojonegoro	–	73,12	23,20	3,68	75,18
23. Tuban	–	67,85	26,95	5,21	62,41
24. Lamongan	–	55,96	38,76	5,28	48,71
25. Gresik	–	51,61	43,00	5,39	45,12
26. Bangkalan	3,74	45,94	49,51	0,82	62,74
27. Sampang	2,03	82,21	9,76	6,00	42,69
28. Pamekasan	1,23	63,15	33,36	2,26	62,24
29. Sumenep	4,00	47,70	43,15	5,16	65,98
71. Kota Kediri	–	58,76	35,16	6,08	59,72
72. Kota Blitar	–	81,36	11,03	7,62	65,76
73. Kota Malang	3,43	54,92	26,65	15,00	61,11
74. Kota Probolinggo	–	67,90	31,28	0,82	49,31
75. Kota Pasuruan	–	87,65	9,39	2,96	48,03
76. Kota Mojokerto	–	60,75	35,82	3,43	27,02
77. Kota Madiun	1,72	57,57	38,92	1,78	44,71
78. Kota Surabaya	2,77	69,81	24,94	2,48	46,54
79. Kota Batu	–	43,52	42,75	13,73	53,40
Jawa Timur	0,98	63,64	31,03	4,35	57,48

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.5.1
Proporsi Penduduk Lansia Laki-laki yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempa Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas/ Pustu	UKBM	Prak- tek Batra	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	23,04	4,92	51,11	8,97	15,40	–	10,19	2,18
02. Ponorogo	5,60	10,40	38,22	13,56	23,96	16,03	6,07	0,59
03. Trenggalek	10,78	–	49,24	20,31	14,01	1,98	2,38	5,83
04. Tulungagung	18,61	21,46	23,12	2,71	23,38	1,83	12,91	3,47
05. Blitar	8,54	17,32	62,72	4,61	6,82	–	1,24	–
06. Kediri	14,49	8,27	42,46	22,89	14,85	–	1,08	–
07. Malang	9,78	22,55	47,30	15,82	17,46	2,01	4,92	–
08. Lumajang	5,28	–	56,94	11,63	26,60	7,91	1,55	–
09. Jember	23,49	3,14	58,03	8,73	10,82	0,00	11,62	5,80
10. Banyuwangi	6,34	8,96	36,63	5,41	40,49	4,88	3,93	6,84
11. Bondowoso	5,35	3,17	79,66	1,66	4,86	3,57	6,48	9,95
12. Situbondo	5,10	12,50	54,76	2,93	22,58	–	–	4,22
13. Probolinggo	7,45	–	68,89	8,71	20,67	–	5,99	–
14. Pasuruan	15,51	–	58,81	7,74	17,72	–	11,52	4,87
15. Sidoarjo	24,30	36,69	10,55	21,38	9,26	2,84	–	–
16. Mojokerto	28,51	11,27	32,94	7,65	17,07	3,58	2,11	3,03
17. Jombang	17,33	5,84	39,61	26,63	15,31	0,78	–	–
18. Nganjuk	16,29	7,24	48,33	10,48	14,38	3,28	–	3,28
19. Madiun	30,26	2,80	38,91	5,72	20,18	3,13	–	1,79
20. Magetan	18,37	4,12	34,99	20,26	19,59	7,08	–	4,17
21. Ngawi	12,19	5,19	28,67	4,18	39,78	4,57	5,23	2,31
22. Bojonegoro	12,59	–	62,14	14,60	16,10	9,00	–	–
23. Tuban	13,00	25,76	49,21	–	15,90	–	6,89	–
24. Lamongan	25,01	11,40	39,19	1,07	51,01	2,48	2,61	–
25. Gresik	3,14	48,86	24,40	22,74	2,89	–	–	–
26. Bangkalan	2,10	4,45	57,11	1,46	23,84	15,24	–	–
27. Sampang	4,82	–	72,06	1,29	22,18	4,55	6,33	2,89
28. Pamekasan	19,09	2,51	38,67	3,73	7,64	24,68	4,41	9,17
29. Sumenep	–	–	41,37	26,05	12,33	7,97	0,23	12,06
71. Kota Kediri	52,61	3,08	23,13	8,10	24,99	–	–	–
72. Kota Blitar	4,02	52,12	16,29	17,41	21,00	–	2,47	9,51
73. Kota Malang	29,38	29,10	27,09	10,81	7,70	–	–	–
74. Kota Probolinggo	8,61	4,75	40,86	12,87	55,80	–	–	–
75. Kota Pasuruan	6,07	14,87	51,43	7,94	27,62	–	9,93	–
76. Kota Mojokerto	25,39	41,01	11,16	4,71	19,43	–	–	–
77. Kota Madiun	37,32	19,11	12,34	3,34	27,88	–	–	–
78. Kota Surabaya	31,87	35,65	7,88	9,60	16,41	–	2,28	–
79. Kota Batu	48,64	22,88	11,09	–	20,67	–	–	–
Jawa Timur	15,58	12,68	43,20	10,94	18,50	3,36	3,63	2,25

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.5.2
Proporsi Penduduk Lansia Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas/ Pustu	UKBM	Prak- tek Batra	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	10,65	4,51	62,57	10,31	21,30	8,54	1,68	–
02. Ponorogo	3,13	9,75	48,47	6,74	12,86	31,02	–	0,49
03. Trenggalek	6,53	5,05	37,23	19,90	19,29	9,28	–	8,97
04. Tulungagung	11,82	8,65	51,37	4,45	16,22	7,48	–	3,55
05. Blitar	1,19	4,79	49,26	25,32	19,92	–	8,38	–
06. Kediri	4,72	14,23	56,73	6,96	17,90	–	–	–
07. Malang	3,06	12,40	56,95	7,04	21,03	6,17	2,13	–
08. Lumajang	4,32	7,34	52,68	18,97	17,79	2,05	4,01	–
09. Jember	13,17	12,53	44,39	14,30	11,66	–	6,70	–
10. Banyuwangi	9,01	16,15	52,61	17,50	19,80	–	–	5,84
11. Bondowoso	–	14,97	65,95	–	10,37	7,93	3,14	5,05
12. Situbondo	8,58	4,23	69,20	8,96	7,95	–	–	1,08
13. Probolinggo	5,59	6,25	79,36	3,09	7,61	11,42	12,35	–
14. Pasuruan	–	8,14	85,24	1,54	1,73	3,36	–	1,50
15. Sidoarjo	9,90	36,59	19,20	13,11	21,20	0,90	3,80	–
16. Mojokerto	19,41	12,75	31,89	3,41	11,84	17,20	–	3,49
17. Jombang	2,87	8,37	43,79	10,24	31,21	3,03	3,91	3,67
18. Nganjuk	12,23	8,44	56,40	8,14	7,40	2,85	1,11	3,42
19. Madiun	20,06	–	42,28	3,27	33,85	7,79	–	7,00
20. Magetan	8,87	11,46	49,51	20,97	16,17	2,50	–	–
21. Ngawi	14,42	7,42	25,86	14,97	35,04	5,32	1,16	1,10
22. Bojonegoro	8,72	4,82	47,90	11,68	21,65	8,86	3,63	–
23. Tuban	10,40	1,89	74,72	12,77	9,70	–	–	–
24. Lamongan	6,84	4,11	50,08	20,51	31,63	7,37	1,35	–
25. Gresik	3,58	19,32	34,36	12,97	21,64	8,33	1,93	–
26. Bangkalan	6,28	1,76	71,90	–	16,12	4,51	1,66	–
27. Sampang	–	–	79,02	1,20	28,48	5,82	13,85	–
28. Pamekasan	2,45	2,55	37,05	5,94	16,51	30,16	0,09	10,54
29. Sumenep	–	–	53,57	13,81	20,74	13,65	1,87	6,17
71. Kota Kediri	17,14	18,93	21,54	8,87	31,22	2,35	–	–
72. Kota Blitar	22,74	27,67	12,47	4,73	33,90	–	–	3,12
73. Kota Malang	16,21	21,04	27,90	6,63	31,12	–	1,47	–
74. Kota Probolinggo	5,77	8,08	28,83	2,65	41,15	17,81	6,35	6,30
75. Kota Pasuruan	6,25	2,35	32,36	6,44	55,37	–	–	–
76. Kota Mojokerto	9,73	38,45	–	4,14	54,18	–	–	–
77. Kota Madiun	31,90	5,58	13,57	5,48	47,39	–	–	–
78. Kota Surabaya	31,75	37,08	9,77	6,87	12,80	–	1,73	–
79. Kota Batu	18,76	37,22	32,00	2,77	9,26	–	–	–
Jawa Timur	9,00	11,65	47,31	10,58	19,92	5,46	2,82	1,64

Sumber: Susenas Maret 2023.

Lampiran 5.5.3
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2023

Kabupaten/Kota	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas/ Pustu	UKBM	Prak- tek Batra	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	17,70	4,74	56,05	9,55	17,95	3,68	6,52	1,24
02. Ponorogo	4,25	10,05	43,83	9,83	17,89	24,22	2,75	0,53
03. Trenggalek	8,26	3,00	42,11	20,06	17,15	6,32	0,97	7,69
04. Tulungagung	15,25	15,13	37,09	3,57	19,84	4,62	6,53	3,51
05. Blitar	4,01	9,59	54,41	17,39	14,90	-	5,65	-
06. Kediri	9,97	11,03	49,06	15,52	16,26	-	0,58	-
07. Malang	5,68	16,36	53,19	10,46	19,64	4,55	3,22	-
08. Lumajang	4,77	3,96	54,64	15,59	21,84	4,74	2,87	-
09. Jember	18,14	8,02	50,95	11,62	11,26	0,00	9,06	2,79
10. Banyuwangi	8,02	13,47	46,66	13,00	27,50	1,82	1,46	6,21
11. Bondowoso	2,52	9,42	72,41	0,78	7,78	5,88	4,71	7,36
12. Situbondo	6,83	8,39	61,94	5,92	15,31	-	-	2,66
13. Probolinggo	6,26	3,98	75,56	5,14	12,36	7,27	10,04	-
14. Pasuruan	6,52	4,72	74,14	4,15	8,45	1,95	4,84	2,91
15. Sidoarjo	16,77	36,64	15,07	17,06	15,50	1,83	1,99	-
16. Mojokerto	23,90	12,02	32,41	5,50	14,43	10,47	1,04	3,26
17. Jombang	9,25	7,25	41,95	17,47	24,20	2,04	2,18	2,05
18. Nganjuk	13,71	8,00	53,46	8,99	9,94	3,01	0,71	3,37
19. Madiun	24,04	1,09	40,97	4,22	28,52	5,97	-	4,97
20. Magetan	13,34	8,01	42,68	20,64	17,78	4,65	-	1,96
21. Ngawi	13,64	6,63	26,85	11,16	36,72	5,05	2,60	1,52
22. Bojonegoro	10,66	2,41	55,02	13,15	18,87	8,93	1,82	-
23. Tuban	11,57	12,59	63,29	7,04	12,48	-	3,09	-
24. Lamongan	13,03	6,59	46,37	13,89	38,23	5,71	1,77	-
25. Gresik	3,39	31,94	30,10	17,15	13,62	4,77	1,10	-
26. Bangkalan	4,84	2,69	66,79	0,50	18,79	8,22	1,09	-
27. Sampang	2,42	-	75,52	1,25	25,31	5,18	10,07	1,45
28. Pamekasan	10,83	2,53	37,87	4,83	12,04	27,40	2,26	9,85
29. Sumenep	-	-	48,98	18,41	17,58	11,51	1,25	8,39
71. Kota Kediri	35,33	10,80	22,35	8,47	28,02	1,14	-	-
72. Kota Blitar	11,73	42,04	14,72	12,18	26,32	-	1,45	6,88
73. Kota Malang	21,68	24,38	27,56	8,36	21,40	-	0,86	-
74. Kota Probolinggo	7,10	6,53	34,43	7,41	47,97	9,51	3,39	3,37
75. Kota Pasuruan	6,18	7,16	39,69	7,02	44,71	-	3,82	-
76. Kota Mojokerto	16,07	39,49	4,52	4,37	40,12	-	-	-
77. Kota Madiun	33,35	9,21	13,24	4,91	42,16	-	-	-
78. Kota Surabaya	31,80	36,46	8,96	8,04	14,35	-	1,97	-
79. Kota Batu	28,52	32,53	25,17	1,87	12,98	-	-	-
Jawa Timur	11,84	12,10	45,53	10,73	19,31	4,55	3,17	1,90

Sumber: Susenas Maret 2023

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No 43-44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343 Fax. (031) 8494007
Homepage : <https://jatim.bps.go.id>, Email : bps3500@bps.go.id

ISSN 2407-3202



9 772407 320005